PELATIHAN KADER DASAR (PKD)

Aktualisasi diri menuju Kader Berkeadaban

PENGURUS KOMISARIAT

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

SUNAN GIRI BOJONEGORO

MASA GERAK 2018-2019

Sekretariat : Jl. Ahmad. Yani No. 10, Sukorejo – Bojonegoro Jawa Timur 62115

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang didirikan pada tanggal 17 April 1960 yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1379 H di Surabaya. Pada awalnya PMII merupakan Underbouw dari NU akan tetapi pada tanggal 14 Juli 1971 PMII dengan deklarasi Munarjatinya menyatakan diri sebagai organisasi independent.Pelatihan Kader Dasar (PKD) merupakan pengkaderan formal basic kedua di PMII Pasca Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA). Oleh karena itu, fase ini merupakan tahap lanjutan, yakni persoalan doktrinasi nilai-nilai dan missi PMII, sehingga fokus pengkaderan adalah penanaman loyalitas, serta militansi gerakan yang mempunyai komitmen moral, sehingga memiliki karakter dalam jiwa pergerakan dan mempunyai watak dasar kritis transformatif dan peka terhadap keadaan sosial, terutama dalam konteks kepedulian dalam merespon masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum serta pendidikan dan kemanusiaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kaderisasi PMII pada hakikatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna mengembangkan potensi sertiap kader. Sistem kaderisasi di zaman sekarang juga harus senantiasa memperhatikan relevansi orientasi kaderisasi, hal ini mengisyaratkan pentingnya semangat pengabdian, kebangsaan, keprofesionalitasan serta keintelektualitasan para kader. Maka sistem ini dapat tercipta dengan merumuskan konsep pola kaderisasi yang menjadi kategorisasi khusus pada sebuah program kerja. Sedangkan kategorisasi program tersebut antara lain :

Pertama, gerakan intelektualitas, yakni dengan mengembangkan wacana dan wawasan pergerakan, keislaman Inklusif (Ahlissunnah Wal Jama'ah), nasionalisme inklusif sosial kemasyarakatan, dan wawasan global. Gerakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi bangsa yang visioner dengan semangat kerakyatan dalam diri kader. Gerakan ini di aktualisasikan dalam formulasi baru sehingga menjadi gerakan kongkrit, yakni Kaderisasi berbasis literasi, sebagai agenda besar organisasi dengan tujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin pemuda dengan semangat kepeloporan dalam menggagas perubahan yang selanjutnya bersedia meningkatkan ghiroh perjuangan dan pergerakan dengan gerakan membaca, menulis, serta gerakan intelektual yang dapat menekankan aspek kognitif, afektif, agar tidak ada nilai stagnanisasi pola gerakan, selain merekonstruksi pemikiran para kader dengan berbagai macam wacana yang bersiat umum, sosial, maka ia juga dapat mengsinergikan pemahamannya dalam sebuah dirkursus literatur organisasi, sehingga mampu mengasah kemampuan dan keintelektualan dalam mengejewantahkan pengetahuan dalam sebuah karya suci yakni tulisan. sehingga mampu bersaing dalam tatanan bangsa di era perkembangan media saat ini. Maka diharapkan para kader dapat menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dengan mengedepankan nilai keadilan dan moralitas sebagai kontrol pribadi pada tiap individu. Sistem kaderisasi PMII berdasarkan analisis sosial dalam scope nasional dan lokal dalam kurikulum kaderisasi yang komprehensif dan holistik untuk mencapai tujuan kaderisasi di atas. Juga untuk mengedepankan potensi kader dalam berbagai bidang / bentuk kreatifitas tanpa batas.

Kedua, gerakan aktualisasi penanamn nilai-nilai keislaman, Nilai dasar pergerakan dan ke PMII-an harus disesuaikan dengan proses melalui ruang kaderisasi nonformal dan ruang kultural yang ada agar nilai dan pemahaman tersebut dapat disampaikan baik secara tekstual atapun nontekstual dan mampu menciptakan gerakan masif kader. Oleh karena itu diadakan sebuah proses sehingga para regenarator itu siap untuk menjalankan dan mengembangkan organisasi itu PMII sebagai salah satu elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia. Berdasarkan konteks pemikiran dan gerakan serta sistem kaderisasi yang telah di tentukan tersebut, maka diadakan Pelatihan kader Dasar (PKD) 2019 oleh PK. PMII Sunan Giri Bojonegoro ini dengan tema ***"Aktualisasi Diri Menuju Kader Berkeadaban"*** sebagai ajang untuk apresiasi, pengembangan, dan pengabdian diri sebagai pemuda tanah air senantiasa berusaha meningkatkan gerakan intelektual dalam organisasi untuk melakukan perubahan demi Indonesia tercinta, hingga terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Bojonegoro, 28 Maret 2019 **PK. PMII SUNAN GIRI BOJONEGORO**

DAFTAR ISI

MATERI I

PARADIGMA PMII

A. Pengantar

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandaikan terbentuknya faktor-faktor produksi, distribusi dan wilayah perebutan. Tanpa mengunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroisme sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Yang pertama-tama perlu di kembangkan di PMII adalah bahwa sejarah itu berjalan dengan masa lalu, bukan karena semata-mata masa lalu itu ada, tetapi karena masa lalu telah membentuk hari ini dan hari esok. Artinya capaian tertinggi dari sebuah gerakan adalah ketika satu generasi telah berhasil mengantar generasi berikutnya menaiki tangga yang lebih tingi. Visi historis inilah yang akan menjadikan PMII sebagai organisasi besar yang berpandangan kedepan dan universal, karena PMII tidak didirikan hanya untuk bertahan selama sepuluh atau dua puluh tahun, tetapi PMII didirikan untuk melakukan perubahan tata struktur dan sistem. Dengan demikian paradigma menempati posisi yang sangat vital dalam membangun gerakan PMII ke depan, bukan semata-mata karena kita membutuhkan paradigma, tetapi karena paradigma itu seharusnya memandu gerakan PMII dalam *longue duree* dalam bingkai dunia.

Selama ini, perdebatan paradigmatik di PMII hanya bersifat reaksioner, bukan sebuah inisiatif yang didasarkan pada gerak maju yang terencana. Kondisi seperti inilah yang kemudian membatasi ruang lingkup gerakan PMII yang hanya melingkar di orbit internal NU dan tidak mampu melakukan pendudukan dan perebutan sektor-sektor setrategis yang memiliki resonansi luas kepada publik. Sejauh berkaitan dengan perubahan struktural yang dicitakan PMII, maka pendudukan dan perebutan sektor-sektor publik adalah suatu keniscayaan. Masalahnya selama ini yang di puja-puja oleh sebagaian besar aktifis PMII adalah gerakan kultural *an sich* yang mengabaikan segala sesuatu yang bersifat struktur. Katakanlah dikotomi gerakan kultural-struktural yang menjadikan PMII sebagai penjaga gerbang kultural sementara organisasi kemahasiswaan yang lainnya, misalnya sebagai pemain struktural telah menimbulkan kesesatan berfikir sedari awal tentang gerakan yang dibayangkan (*imagined movement*) oleh kader-kader PMII, bahwa PMII cukup hanya bergerak di LSM-LSM saja dan tidak perlu berorientasi di kekuasan. Jadi paradigma merupakan suatu keniscayaan yang di bangun berdasakan atas pandangan PMII tentang dunia dalam realitas globalisasi dan pasar bebas yang saat ini sedang berjalan.

B. Paradigma Gerakan

Membangun paradigma gerakan memang sesulit membaca kenyataan yang semestinya menjadi pijakan paradigma itu. Gerakan yang dibangun tidak diatas landasan kenyataan hanya akan menjadi struktur apalagi peradaban. Paradigma yang baik adalah paradigma yang mampu menjadikan sejarah sebagai bahan penyusun yang dipadukan dengan kenyataan hari ini. Kenapa sejarah menjadi penting dalam penyusunan paradigma gerakan? Sebagaimana diketahui bahwa sejarah itu menyimpan masa lalu yang telah menyusun masa kini dan masa depan. Jadi, dengan mengkombinasikan sejarah dengan real-life hari ini, kita akan mampu membaca kenyataan secara benar sehingga kita tidak akan terjebak dalam kenyataan mediatik yang manipulatif dan menyesatkan.

1. Dilihat Dari Sejarah Gerakan Mahasiswa

Realitas politik memang mengatakan independensi perguruan tinggi yang notabene adalah basis pendidikan nasional, sehingga banyak harapan akan adanya pemikiran-pemikiran baru tentang ke-Indonesiaan yang dihasilkan dari institusi ini. Selain civitas akademika yang merepresentasikan kelompok intelektual, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide-ide ke-Indonesiaan, dengan beragam aktualisasi. Cita-cita luhur para mahasiswa Indonesia, ternyata hanya menjadi utopi, karena gerakan mahasiswa Indonesia hanya menjadi alat dari

kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini tentunya didasari pada beberapa fakta dari proses sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia.

Pertama, gerakan mahasiswa tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit karena melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangan sistem politik nasional yang selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari RIS, Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi ke Republik, yang disebabkan oleh lemahnya posisi negara atas rakyatnya. *Kedua,* gerakan mahasiswa tahun 1974 – 1975, juga sempat terprofokasi oleh isu-isu anti Jepang sehingga pada tanggal 15 Januari 1975 yang kemudian di kenal dengan Malari, terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, padahal ini tidak lebih akibat dari pertarungan untuk memperebutkan pasar antara AS dan Jepang. Gerakan yang kemudian dijawab oleh pemerintah dengan dikeluarkannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

Ketiga, gerakan Mahasiswa tahun 1998-pun tidak jauh beda. Mahasiswa terprovokasi oleh isu-isu yang di buat oleh pihak luar, meskipun gelombang aksi terjadi di seluruh penjuru Indonesia, tetapi yang lebih signifikan untuk mendorong pemerintah Soeharto mundur adalah fluktuatifnya kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri. Situasi pemerintahan yang seperti ini, sehingga memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan 6 visi reformasi (Adili Soeharto, Cabut Dwi Fungsi ABRI, Hapus KKN, Tegakkan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Amandemen UUD`1945) yang entah dari mana datangnya, namun tiba-tiba menggema dan menjadi simbul perlawanan yang disuarakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. "Gerakan reformasi ini telah dimanipulasi para elit politik, baik elit politik yang lama maupun yang baru, yang masih berambisi meraih kekuasaan bagi diri dan kelompoknya dengan cara saling kompromi diantaranya lewat pemilu yang dilaksanakan tahun 1999." Akankah kita para mahasiswa sekarang kembali akan menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan riil masyarakat?

2. **Mahasiswa Dalam Pergerakan Moral**

Terlepas dari sejarah panjang perjalanan gerakan mahasiswa di Indonesia, kekuatan mahasiswa hanya mampu menjadi kelompok *preasure group* yang ternyata di dorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada sisi lain mahasiswa tidak mampu memberikan satu rumusan konseptual dan solusi atas berbagai problematika transisi. Kegagalan-kegagalan yang tetap harus kita akui sebagai bentuk kelemahan kita bersama, yang salah satunya disebabkan keterjebakan kita dalam stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral.

Gerakan mahasiswa tidak pernah mengunakan gerakan moral sebagai pilihan bentuk aktualisasinya, tetapi yang dilakukannya adalah gerakan politik. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, *pertama,* gerakan mahasiswa dalam orientasinya yang ingin melakukan perubahan, selalu menggunakan ukuran perubahan struktur atau lebih spesifik perubahan kebijakan sebagai ukuran keberhasilannya. Fenomena ini selalu dihasilkan dari proses gerakan politik bukan gerakan moral. *Kedua,* stigma gerakan moral tidak lain adalah bentuk justifikasi dari kebenaran akademis yang kelahirannya dilatar belakangi karena independensi perguruan tinggi. Padahal realitas empiriknya gerakan mahasiswa banyak mendapatkan donor dari partai politik, pemerintah, founding internasional dan lain-lain.

Ketiga, gerakan mahasiswa yang mengklaim dirinya menyuarakan aspirasi rakyat dengan mengunakan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan yang lainnya, telah menjadikan idiom-idiom tersebut sebagai standar moral gerakan, yang cenderung dikotomis karena pada realitasnya moral kemudian menjadi alat untuk mengukuhkan eksistensi gerakan mahasiswa dan menyerang lawan. *Keempat,* moral dalam gerakan mahasiswa sebenarnya hanya menyetuh pada aspek psikologi, emosional dan romantisme, bukan moral yang

menjadi subtansi dari gerakan, karena kebangkitan gerakan mahasiswa lebih signifikan dipengaruhi faktror eksternal yang lebih massif.

Untuk itu, refleksi bersama atas internal gerakan mahasiswa yang katanya sebagai tulang punggung masa depan bangsa harus segera mungkin dilakukan. Keberadaan moral dalam gerakan mahasiswa tidak lain adalah bentuk pelarian dari individu seorang mahasiswa yang tidak mampu membebaskan diri dari belenggu moral dalam konteks pribadi, yang kemudian membawanya dalam komunitas gerakan mahasiswa. Tidak bebasnya belenggu disini meliputi, *Pertama,* belenggu moral dalam prespektif teologis yang mengikat relasi manusia dengan Tuhan dalam menjalankan hukum agama dan kewajiban sebagai seorang hamba-Nya dimana terdapat penilaian atas perilaku individu yang kemudian disebut dengan dosa atau tidak dosa dan halal atau haram. *Kedua,* belenggu dalam perspektif norma yang mengikat hubungan antar individu dan masyarakat, dimana terdapat penilaian masyarakat terhadap perilaku individu yang kemudian disebut bermoral atau amoral karena perilakunya yang keluar dari batasan-batasan norma, etika dan adat yang berlaku di masyarakat. Jadi moral sebenarnya adalah system nilai yang berlaku universal bagi individu bukan komunitas (baca gerakan) dan menjadi alat mekanisme kontrol atas perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Melihat Dari Sejarah PMII

Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia hampir setengah abad, semestinya PMII telah mencapai periode kamatangan, sejak didirikan pada 17 April 1960 sebagai bagian integral dari organisasi NU, PMII memang berfungsi sebagai sayap mahasiswa NU di samping GP Ansor di sayap pemuda, Muslimat di sayap ibu-ibu, Fatayat di sayap remaja putri dan IPNU/IPPNU di sayap pelajar serta Banom-Banom lain, maka komitmen PMII kapada jam`iyah NU adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka keterlibatan PMII di masa-masa awal berdirinya sebagai penyokong Partai NU adalah sebuah keharusan.

Pada tahun 1974 ketika NU telah melakukan fusi politik dengan partai-partai Islam lain, dalam PPP, maka deklarasi independensi di Munarjati Malang juga merupakan pilihan sejarah yang sangat penting. Dengan tegas PMII menyatakan independen dari NU karena PMII memang harus menegaskan visinya bukan sebagai bagian partai politik. Demikian pula, deklarasi interdependensi pada dekade 1980-an, yang kembali menegaskan ke saling tergantungan antara PMII-NU adalah bukti bahwa PMII tidak akan dapat meninggalkan komitmennya terhadap jam`iyah NU. Pilihan-pilihan dependensi-independensi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Perdebatan-perdebatan selama tiga dekade awal PMII tampaknya hanya berkisar di sekitar pilihan-pilihan ini belaka. Ini berakibat pada terbengkalainya rancangan-rancangan kedepan yang berada di luar batas-batas NU. Ini tentunya kontra produktif terhadap PMII sebagai sebuah gerakan yang mengandaikan adanya perubahan sistem dan struktur dalam jangka panjang, karena tidak akan perubahan dapat bergerak keluar dari batas-batas kulturalnya. Ini yang kemudian disebut sebagai jebakan primodialisme dalam gerakan, karena PMII tidak akan dapat pernah berperan sebagai agen transformasi kedalam NU yang nyata-nyata adalah komunitas dari mana ia lahir, alih-alih menjadi bagian dari kemapanan NU yang membekukan.

Dengan demikian komitmen PMII terhadap NU adalah komitmen yang mengambil bentuknya dalam clas of strugle yang akan mengawal visi dan misi NU kedepan disamping transformasi internal tersebut. Perdebatan yang lebih produktif baru muncul dekade 1990-an seiring dengan semakin luasnya pengaruh pemikiran Gus Dur di kalangan muda NU, terutama PMII. Figuritas Gus Dur sebagai tokoh demokrasi dan pengusung civil society yang kritikal terhadap pemerintahan rezim Soeharto sangat berpengaruh dalam pembentukan pola fikir aktifis-aktifis PMII. Yang perlu di catat adalah bahwa secara paradigmatik kepengurusan sahabat A. Muhaimin Iskandar pernah mensosialisasikan (paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran) yang implikasinya sangat luas terhadap pola

gerakan PMII hampir diseluruh Indonesia. Dipandu oleh gagasan *free market of ideas* periode ini menyaksikan sebuah massive enlightenment di tubuh PMII. Selama setidak-tidaknya, paruh kedua dekade 1990-an PMII dengan gigih memperjuangkan demokrasi dan civil society sebagai nilai-nilai pembebasan. Dari masa inilah muncul optimisme baru tentang gairah gerakan di PMII.

Paradigma arus balik masyarakat pingiran yang di pandu oleh gagasan *free market of ideas* tersebut berhasil menciptakan kader-kader PMII yang kritis dan memiliki militansi gerakan yang memadai dan sikap yang terbuka. Keterbukaan itu ditandai dengan luasnya pergaulan aktifis-aktifis PMII dengan kelompok-kelompok minoritas yang selama ini selalu terkucilkan. Namun, diluar keberhasilan paradigma arus balik FMN (Forum Mahasiswa Nahdliyin) tersebut, selalu ada yang terasa belum selesai dibangun di PMII, indikasi yang paling jelas adalah ketika KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI yang ke-4 pada november 1999. Secara serta merta para aktifis PMII, NU dan juga aktifis-aktifis civil society pada umumnya mengalami kebingungan apakah perjuangan civil society harus berakhir ketika Gus Dur yang selama ini menjadi tokoh dan simbul perjuangan civil society di Indonesia telah naik ketampuk kekuasan. Nampaknya sikap para kader PMII terbelah dua pada saat itu. Ada yang menghendaki agar PMII tetap bergerak di jalur kultural dan ada pula yang menghendaki agar PMII harus membela Gus Dur. Dari sinilah kemudian mulai muncul dikotomi NU kultural dan NU struktural, yang secara otomatis juga terjadi di PMII. PMII kultural dan PMII struktural, yang kedua-duanya tidak saling bertemu dan cenderung saling menyalahkan. Sampai sekarang, dikotomi itu masih sedikit terasa sekalipun telah kehilangan relevansinya semenjak Gus Dur di jatuhkan oleh sebuah konspirasi politik maha tinggi.

Artinya paradigma arus balik telah patah disini. Paradigma ini kemudian di ganti dengan paradigma Kritis-Transformatif yang nalar penyusunannya tidak juah beda dengan nalar penyusunan paradigma arus balik. Dengan kata lain, paradigma ini melanjutkan kagagapan PMII dalam bersinggungan dengan kekuasan. Setidak-tidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan patahnya ke dua paradigma ini. *Pertama,* keduanya di desain hanya untuk melakukan resistensi terhadap otoritarianisme tanpa kompleksitas aktor di level nasional yang selalu terkait dengan perubahan di tingkat global dan siklus politik-ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh maraknya LSM pro demokrasi dan gencarnya isu anti militerisme pada dekade 1990-an adalah akibat dari runtuhnya Uni Soviet sebagai rival USA dalam kompetisi hegemoni dunia.

Kedua, kedua paradigma ini hanya menjadi bunyi-bunyian yang tidak pernah secara real menjadi habitus atau laku di PMII. Akibatnya, bentuk resistensi yang muncul adalah resisten tanpa tujuan, yang penting melawan. Sehingga ketika perlawanan itu berhasil menjatuhkan Soeharto terlepas ada aktor utama yang bermain, PMII dan organ-organ pro demokrasi lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Dari sini, dapat di baca bahwa paradigma itu tidak disertai dengan semacam *contingency plan* yang dapat menyelamatkan organisasi dalam situasi apapun.

Ketiga, pilihan paradigma ini tidak didorong oleh setrategi (*not strategy-driven paradigm*) sehingga paradigmanya di anggap sebagai suatu yang baku. Mustinya, ketika medan pertempurannya telah berganti, maka strateginyapun harus berbeda. Ketika medan pertempuran melawan otoritarianisme orde baru telah di kalahkan, PMII masih berpikir normatif dengan mempertahankan nalar paradigma lama. Ini membuktikan bahwa PMII tidak berpikir strategis.

Berangkat dari berbagai pengalaman di atas, maka sudah saatnya kita berpikir relistis atas kondisi bangsa kita saat ini. Membangun Indonesia yang benar-benar demokratis dengan menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para *founding father* kita dalam UUD`1945. Untuk itu diperlukan yang namanya pendidikan demokrasi kepada warga negara dan harusnya menjadi satu perhatian mendasar bagi pemerintah dan partai politik sebagai infrastruktur politik negara. Hal ini didasari pada kepentingan bersama

yaitu, pengakuan dan penghormatan atas hak asasi, harkat dan martabat individu diakui, penegakan aturan hukum, menjalankan kewajiban bersama dan menempatkan kepentingan umum menjadi kepedulian bersama.

C. Strategi Bergerak Dengan Paradigma Kritis

Akhir abad XX dan awal abad XXI ini telah menyaksikan maraknya gerakan anti globalisasi yang telah mengharu-biru Seattle sampai Genoa dan sekarang mulai menyebar kenegara-negara dunia ke tiga. Gerakan seperti ini akan mengalami kegagalan dalam situasi seperti ini karena nalar anti globalisasi sama dengan nalar globalisasi. Tidak ada ruang setrategi yang tersisa dengan gerakan yang demikian frontral. Dinegara-negara maju gerakan semacam ini dimungkinkan karena di topang oleh kesadaran setrategis yang mendalam, sementara di negara-negara peryphyery seperti Indonesia gerakan ini berubah menjadi semacam gerakan konsorsium LSM anti globalisasi yang mengajukan diri untuk mendapatkan kucuran dari funding agency sebagai kepanjangan tangan langsung dari suatu pemerintah. Artinya gerakan anti globalisasi di Indonesia menjadi lelucon bahan tertawaan di siang hari. Lantas apakah gerakan yang tepat adalah gerakan pro globalisasi atau reserve ?

Gerakan pro globalisasi tanpa reserve berati menghanyutkan diri dalam arus globalisasi tanpa pengetahuan yang cukup bagaimana harus menepi, karena sekali tersedot arus maka akan sulit untuk kembali. Bentuknya yang paling kongkrit adalah menjadi agen kepentingan-kepentingan global baik pada aras wacana maupun pada aras operasi khusus mereka. Hanyut dalam arus neoliberalisme berati menjadikan uang sebagai tanah air dan bangsa, karena ideologi pasar bebas tidak mengenal batas-batas teretori negara-bangsa, yang dikenal adalah hambatan-hambatan tarif, proteksi, subsidi, nasionalisasi. Itulah batas-batas negara-pasar (market-state).

Gerakan yang berangkat dari kedua paradigma di atas, yaitu gerakan pro dan anti globalisasi akan mengalami kegagalan karena tidak mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar dari pada proyek politik isu tunggal dan heroisme belaka. Atau gerakan ini memang tidak didesain untuk melakukan perubahan sistem dalam jangka panjang. Karena nalarnya yang mediatik (ukuran keberhasilannya di ukur dari coverage media terhadap aksi-aksinya) maka sangat jelas bahwa orientasi hanya bersifat jangka pendek. Gerakan-gerakan inilah yang didorong justru oleh struktur neoliberalisme karena gampang di patahkan dan di aborsi.

Mari kita mencoba melihat nalar masing-masing gerakan ini. Gerakan anti globalisasi (jika sungguh-sungguh) didominasi oleh nalar anti asing (xenophobia) yang melihat setiap orang luar yang masuk ke dalam wilayahnnya sebagai ancaman tanpa mencoba mengambil manfaat dari interaksi yang mungkin terjadi antara keduanya. Karena globalisasi berintikan pemain-pemain asing yang dilihat sebagai ancaman, maka untuk melawannya harus dengan gerakan anti globalisasi. Gerakan ini menafikkan interaksi dan komunikasi, pertukaran antara global structure dengan local structure. Nalar anti asing ini bermanfaat jika secara setrategis dapat digunakan untuk membangkitkan semangat dan kreatifitas internal berhadapan dengan global threat tadi. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh nalar semacam ini adalah isolasi diri dari pergaulan dunia tanpa mencoba untuk belajar dari keberhasilan negara-negara lain, walaupun tidak harus mengikuti jalan mereka.

Catatan : ....

....

....

....

MATERI 2

NAHDLOTUN NISA'

"Andai tidak ada gerakan pembebasan perempuan, gerakan perempuan tidak akan pernah melahirkan pencerahan, dan saat itulah kita terpaksa harus merayakan matinya tubuh perempuan!"

(Kristeva)

A. Islam & Keterpurukan Perempuan

Perjuangan menegakkan keadilan bagi hak-hak perempuan adalah perjuangan yang telah lama dimulai. Dalam Islam sendiri, banyak figur yang telah menjadi teladan dalam berkiprah dan bergerak untuk memperjuangkan hak tersebut. Siti Hajar (ibunda Nabi Ismail AS.) seorang pejuang hidup dan pengembara yang sangat tegar. Ratu Balqis pemimpin Negeri Saba' yang adil dan bijaksana serta senang bermusyawarah dengan rakyatnya. Istri Imran yang sangat peduli dengan regenerasi kepemimpinan umat. Siti Maryam (ibunda Nabi Isa AS), seorang perempuan pilihan Allah yang dijadikan sebagai bibit "Sang Penggerak" reformasi kehidupan melalui peran sejarah Nabi Isa, anak yang dikandung, diasuh, dan dikadernya. Tidak kalah hebatnya, kedua putri Nabi Syu'aib AS. yang berprofesi sebagai penggembala domba yang ulet. Menggembala domba adalah peran yang membutuhkan kekuatan, kecerdasan dan kesabaran yang menjadi wahana "diklat" para Nabi Allah. Siti Asyiah (istri Fir'aun) yang tegar menjaga iman dan moralitas dari pengaruh suami dan masyarakat di sekitarnya, serta berperan sebagai tokoh kunci penyiapan Musa kecil sebagai kader pembebabasan Bani Israil. Siti Khadijah binti Khuwailid yang berjuang keras membela ajaran keadilan dan pembebasan perempuan yang dibawa suaminya, Muhammad SAW. dan menjadi perempuan agung yang mengawal Muhammad ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Tidak lupa pula Siti 'Aisyah ummul mukminin yang dengan kemampuan intelektual dan ketangkasan fisiknya menjadi kader Nabi dalam meriwayatkan hadis dan pendidik ulama yang berhasil serta pernah menjadi panglima dalam perang Jamal.

Dalam sejarah Indonesia pra maupun pasca kemerdekaan pun banyak tokoh perempuan terlibat dalam perjuangan universal melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta penjajahan kolonial Belanda. Sekadar mengingatkan memori kita, sebut saja Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA. Kartini, Ratu Syajaratuddin, Nyai Walidah Dahlan, Nyai Ageng Serang, Nyai Sholihah Wahid Hasyim, dan lain-lain. Masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang secara pribadi maupun berjamaah berperan aktif memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, beradab, dan berwawasan masa depan, setidaknya telah menampik anggapan yang minor terhadap posisi dan kapasitas perempuan.

Jika dalam sejarah masa lalu begitu penting dan strategis peran tokoh-tokoh perempuan, maka bagaimana dengan sejarah masa kini dan masa depan, apakah perempuan juga masih memegang peran strategis itu? Ini adalah pertanyaan besar dan pertanyaan inilah yang mengilhami para tokoh kontemporer gerakan perempuan di seluruh dunia, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Kalau dulu kaum perempuan telah banyak berprestasi dan dicatat dengan tinta emas sejarah, apakah pengalaman heroik dan menakjubkan itu akan terulang atau justeru akan tergulung oleh kabut sejarah yang kelam? Ini salah satu PR gerakan perempuan.

Sejarah harem adalah sejarah kelam perempuan. Tradisi harem telah ada sejak ribuan tahun lalu, ketika manusia mempraktikkan sistem kerajaan dalam mengarungi hidup bersama. Tradisi opresif ini terlahir dari rahim sistem masyarakat yang patriarkis dengan eksistensi perempuan dipandang sebagai pelengkap belaka dari keberadaan laki-laki. Bahkan, secara teologis kaum perempuan dituding sebagai penyebab terusirnya Adam dari surga sehingga mereka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman setimpal. Sistem sosial yang tidak memihak, ditambah asumsi teologis yang misoginis, semakin mempertegas bahwa perempuan harus 'dirumahkan', dalam arti dipersempit ruang geraknya atau (kalau perlu) dikebiri hak-hak keperempuanannya; sebuah langkah manis untuk melanggengkan sistem patriarkat.

Untuk meratakan jalan bagi upaya 'perumahan' tersebut, dicetuskanlah gagasan hudud, yakni pemisahan laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan kelamin. Dan kehadiran agama ternyata malah turut memperkukuh sendi-sendi hudud tersebut melalui sabda-sabda langitnya. Di jazirah Arab pra-Islam, hudud marak dipraktikkan oleh masyarakat Kristen Suriah, Bizantium, Mediterania, Mesopotamia, dan Persia. Karenanya, tidak mengherankan jika Islam yang turun di tanah Arab terkena pula 'getah' doktrin hudud ini. Ambil contoh QS Al-Ahzab ayat 33 yang memerintahkan perempuan berdiam diri di rumah atau QS Al-Nur ayat 32 mengenai pembatasan interaksi langsung antara perempuan dan laki-laki.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab (33):33).

[1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

[1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

[1217] Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

Aturan moral yang berlandaskan perbedaan kelamin ini merupakan doktrin etis Islam yang dihasilkan dari persentuhannya dengan budaya lokal, yakni hudud.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, hudud lambat laun tidak lagi menjadi norma sosial yang abstrak, tapi mulai mengalami institusionalisasi. Hudud berubah menjadi upaya pengurungan (untuk tidak mengatakan pemenjaraan) perempuan dalam suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuk aktivitas masyarakat. Biasanya perempuan-perempuan itu ditempatkan di dalam istana. Tugas mereka adalah melayani kehendak raja, mulai urusan mempersiapkan makanan dan mengambilkan minum sang raja sampai ke hal-hal yang berbau seksual. Berawal dari sinilah hudud mengalami institusionalisasi yang kelak dikenal dengan istilah harem.

Daya jangkau 'haremisasi' ini merambah pula sampai kepada upaya pengurungan fisiologis; tubuh menjadi objek penguasaan laki-laki atas perempuan. Haremisasi fisiologis ini mengejawantah dalam bentuk pemberlakuan kewajiban memakai penutup kepala bagi perempuan, entah itu bernama jilbab, jubah, kerudung, purdah, burkak, ataupun lainnya. Lebih-lebih, kewajiban tersebut mendapat justifikasi dalam teks-teks suci agama.

Dalam Islam, jilbab baru diwajibkan pascahijrahnya Nabi ke Madinah dengan diturunkannya QS Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini merupakan hasil interaksi Islam dengan budaya setempat tempat jilbab sudah mentradisi dalam masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, ayat jilbab hendaknya dipahami sebagai respons kultural Islam semata, bukannya doktrin. Menurut Asghar Ali Engineer dalam The Rights of Women in Islam, jilbab tidak terlalu dipersoalkan pada masa Nabi. Namun, jilbab mulai mengalami proses pelembagaan ketika berdiri Dinasti Umayyah sebagai konsekuensi logis dari masuknya pengaruh budaya Romawi dan Sasanid Persia. Fatima Mernissi dalam *The Veil and the Male Elite* menuding upaya 'jilbabisasi' yang digalakkan oleh Dinasti Umayyah telah menambah beban berat perempuan. Gerak perempuan semakin mengalami penyempitan, khususnya dalam hal kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keilmuan yang

setara dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan minimnya nama perempuan dalam daftar tokoh intelektual muslim serta mandulnya kiprah perempuan dalam lembaran sejarah Islam.

Oleh karena itu, tidak terlampau salah jika kita katakan sejarah Islam adalah sejarah laki-laki. Fakta yang sama tentu dialami pula oleh perempuan di seantero dunia yang pernah mewarisi sejarah harem. Sebagai langkah awal untuk meratakan jalan bagi pendekonstruksian harem, jilbab atau apa pun yang setara dengannya harus dipandang sebagai sekadar 'pilihan', bukannya kewajiban.

Wilayah publik yang merupakan ruang berjubelnya manusia dari pelbagai strata sosial dan aneka kepentingan merupakan lahan empuk haremisasi. Dengan diselimuti ideologi patriarkat, dunia publik telah berubah menjadi 'ladang pembantaian' (killing field) bagi eksistensi kaum hawa. Sejarah harem tidak hanya mengontaminasi akal sehat kita, tapi telah menyelinap ke dalam kesadaran kita hingga beberapa hal yang berlaku di masyarakat masih kita anggap sebagai sesuatu yang berada dalam ambang kewajaran. Haremisasi merupakan modus operandi penguasaan laki-laki atas perempuan dengan menggunakan tubuh sebagai mediasinya. Dengan demikian, gerakan pembebasan perempuan harus mampu menghentikan geliat haremisasi sampai ke 'titik nol'. Andai tidak, gerakan perempuan tidak akan pernah melahirkan pencerahan, dan kita terpaksa harus merayakan matinya tubuh perempuan.

B. Nahdlotun Nisa'

Nahdlatul berasal dari kata نَهْضَة yang artinya adalah kebangkitan, *Nahdlah* menurut bahasa berarti "kemampuan dan potensi untuk mencapai kemajuan sosial dan lainnya." di ambil dari kalimat mutiara kitab al-Hikam:

لاَتَصْحَبْ مَنْ لاَ يُنْهِضُكَ حَالَهُ وَلاَيَدُلُّكَ عَلَى اللهِ مَقَالُهُ

Artinya: "Janganlah kamu berteman dengan seseorang, yang perilakunya tidak **membangitkanmu** dan ucapannya tidak menunjukkanmu ke jalan Allah."

Sedangkan *an-Nisa* berasal dari kata النساء yang artinya perempuan.

Secara Literal Nahdlatun Nisa bermakna kebangkitan kaum perempuan. Namun lebih mengarah kepada rasa persaudaraan atas dasar solidaritas terhadap nasib dan perjuangan perempuan, untuk menemukan kembali hak-hak kemanusiaan yang telah lama tercabut.

Dasar Ayat Nahdlatun Nisa

Ketika Islam memuliakan perempuan, untuk apa Nahdlatun Nisa?
Karena Kemuliaan dan Hak-Hak Kaum Perempuan Ternegasikan!

- Perkembangan dan pertumbuhan Islam ke berbagai penjuru dunia tidak bisa dilepaskan dari faktor kultural. Kultur yang dominan saat itu sangat patriakhis.
- Diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan banyak dijumpai dalam kultur ini, dan perempuan pun kerap menjadi korban. Laki-laki dipandang memiliki berbagai kelebihan atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 71 bahwasannya kewajiban yang ditunaikan adalah sama :

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah (09): 71)

Dalam islam, kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi antara laki-laki dan perempuan masing-masing memikul tanggung jawab sama.

Kondisi perempuan saat ini meski Islam telah merintis kampanye penyadaran tentang hak-hak perempuan:

- Menampilkan sesuatu yang kontradiktif dari teks-teks Al-Qur`an
- Perempuan termarginalkan dalam dialektika kehidupan
- Pemasungan hak-hak perempuan

Pokok Pikiran Nahdlatun Nisa

- Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati.
- Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan kodrati.
- Ajaran Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah megalami distorsi akibat pegaruh kondisi sosial dan budaya.
- Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.
- Islam mengakui peran publik perempuan disamping peran domestiknya.

Ciri dan Karakteristik Nahdlatun Nisa
Nahdlatun Nisa
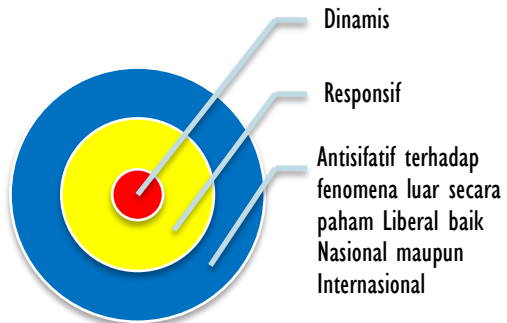
C. Nahdlotun Nisa; Gerakan Perempuan Di Indonesia

Ketika masa pra-kemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya' Dien

yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarkhi Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun, mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan kini.

Di masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki bergaining cukup tinggi. Dan kondisi semacam ini mulai tumbang sejak Orde Baru berkuasa. Bahkan mungkin perlu dipertanyakan: adakah gerakan perempuan di masa rejim orde baru? Bila mengunakan definisi tradisonal di mana gerakan perempuan diharuskan berbasis massa, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan ketika itu. Apalagi bila definisi tradisonal ini dikaitkan dengan batasan a la Alvarez yang memandang gerakan perempuan sebagai sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggota sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Dan Alvarez tidak mengikutkan organisasi perempuan milik pemerintah atau organisasi perempuan milik parpol serta organisasi perempuan di bawah payung organisasi lain dalam definisinya ini. Namun definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, hingga dapat disimpulkan di masa Orba pun telah muncul gerakan perempuan.

Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah wanita. Gerakan perempuan di masa rejim otoriter Orba muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan Orba. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan *Women in Devolopment* (WID) yang telah mendominasi politik gender Orba sejak tahun 70-an, juga wacana femnisme yang dikenal oleh kalangan terbatas (kampus/akademinis) dan ornop.

Sedangkan Gerakan Perempuan Masa Reformasi semestinya pemberdayaannya semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, jsutru ada penurunan di banding masa-masa akhir rejim orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki. Hanya saja harus tetap diakui bahwa angka-angka peranan perempuan di sektor strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur negara dan budaya (termasuk dalam rumah tangga), maka kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensuport perempuan menjadi semacam komoditas.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 3

STRATEGI PENGEMBANGAN PMII

A. Prawacana

PMII adalah organisasi yang bertujuan pada terbentuknya pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Senafasdengan tujuannya tersebut PMII dituntuituntuk membuktikan bahwa arah gerakannya memanifestasikan cita-cita yang dituju.Sebagai organisasi yang etos pergerakannya bersandar opada aspek kemahasiswaan, keislaman dan keindonesiaan, maka pengejawantahan gerakan PMII juga mencirikan ketiga aspek diatas. Aspek kemahasiswaan harus diselaraskan dengan tipologi mahasiswa sebagai *agent of social change*. Dimana mahasiswa mempunyai kekuatan intwelektual untuk mendobrak bentuk-bentuk kemapaman yang menghalangi kemajuan dan secara intens menembus kebekuan realitas menuju dinamika yang mengarah pada pemecahan masalah-masalah sosial.

Pada aspek keislman, PMII meyakini bahwa kehadiran atau eksistensinya adalah untuk mewujudkan peran khalifatullah fi al-ardl, meneruskan risalah kenabian untuk merahmati alam. Islam seharusnya selalu menjadi cahaya (nur) bagi ummatnya di setiap waktu dan di setiap zaman. Oleh karena itu wacana keislaman yang dipahami oleh PMII harus mampu melakukan tafsir terhadap dirinya agar relevansi dan kontekstualisasinya aktual dengan perkembangan zaman. Sementara aspek kebangsaan PMII harus dibuktikan dengan antusiasme aktif terhadap nilai kebangsaan yang ditunjukkan oleh sikap penghargaan atas pluralitas dan inklusivitas serta menghindari ekslusivitas dan sektarian.

Ketiga aspek di atas harus terintegrasi dalam satu perspektif yang saling menopang satu dengan lainnya. Oleh karena itu dialektika aktif di dalam kehidupan masyarakat harus ditunjukkandengan sikap penghargaan, solidaritas, persamaan, kesetaraan, dan anti diskriminasi yang dilandasi suatu kesadaran yang utuh, bukan sebaliknya. Dialektika ini juga hatus mengatasi problema yang tumbuh dan berkembang di masyarakat baik menyangkut aspek politik, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan agama.

B. Karakteristik Kader PMII

Anggota PMII pada umumnya berasal dari desa dengan penghasilan pokok sektor agraris yang berbasis pendidikan disiplin ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial dan sebagian kecil yang berbasis ilmu-ilmu eksakta. Karakter geografis, demografis, sosiologis, membawa implikasi pada sifat dan perilaku komunal baik menyangkut teologi, tradisi dan budayanya. Pemahaman teologis dinaungi oleh doktrin Aswaja yang dikonstruksi sebagai manhaj al-fikr. Realitas nilai dan norma tradisionalis keberagamaan yang telah terbangun dalam lingkungan keluarga, dan masyarakat (terutama pesantren) memiliki korelasi positif terhadap paham keagamaan dan membentuk karakter keberagamaan kader. Latar keberagamaan para kader PMII sarat dengan pemahaman teologi Asy'ariyah yang mengedepankan keseimbangan, solidaritas, dan ketenangan dalam perilaku dan karakternya dalam pengejawantahan hidup bermasyarakat.

Karakter keberagamaan kader PMII ini satu sisi memberikan pengkayaan karena khazanah keagamaan bisa dijadikan modal untuk mengilhami suatu perubahan menuju peradaban. Tetapi khazanah yang dimungkinkan bisa mengarah kepada penciptaan peradaban adalah khazanah yang niscaya untuk memberikan pemecahan aspek kemanusiaan, teknologi, kebudayaan dan spiritualitas. Di sisi lain, kenyataan ini menjadi masalah karena kekayaan khazanah ini tidak memberikan sesuatu *maistream* perubahan. Mungkin karena masih terjadi kontradiksi antara frame lama yang dogmatis dan frame baru yang secara sistematis belum bisa menjadi sandaran perjuangan secara utuh.

Padahal tantangan yang dihadapi adalah karakter modernitas yakni adanya penafian sisi kemanusiaan dan spiritualitas dan hanya mendasarkan pada kehidupan fisik dan material.

Dengan begitu PMII harus melakukan rekonstruksi -malah kalau bisa dekonstruksi- pemahaman terhadap tafsir keagamaan agar lebih hidup sebagai upaya menggagas kehidupan yang lebih bermakna dan tidak hanya ritual tetapi juga sosial. Tauhid tidak hanya ada dalam diri tanpa mampu terrefleksikan dalam kehidupan, tetapi sebaliknya tauhid adalah pemberian jawaban terhadap realitas yang ada. Perubahan yang menjadi sifat asasi manusia mengilhami nalar kader dalam mengapresiasikan pemikiran teologisnya sehingga kader akan selalu menggeliat dengan kemapanan karena berimplikasi pada stagnasi pemikiran yang menciptakan alienasi manusia terhadap realitasnya.

Sebab PMII adalah organisasi kader yang mengarahkan kepada pembentukan kader yang mampu beradaptasi dengan seluruh lingkungan yang ada. Keberpihakan terhadap nilai-nilai harus disandarkan pada realitas kebutuhan anggota dan realitas kebutuhan masyarakat. Komitmen ini harus selalu dikawal sebagai manifestasi pemberdayaan individu (warga) di satu sisi dan disisi lain upaya membangun masyarakat. Dari sinilah kemudian bisa dilihat pembinaan kader yang intens menuju standar kualitas yang mampu berkompetisi dengan realitas sejati yang ada di masyarakat bisa terwujud.

C. Pengembangan Kader dan Perjuangan

Pengembangan dan penguatan kader harus didasarkan pada filosofi leberasi sebagai sentral mengarahkan kepada pencerahan. Pola tata pikir dogmatis menjadi tata pikir dogmatis menjadi tata pikir transformatis. Tata pikir dogmatis cenderung mengarah pola sikap yang statis sedangkan tata pikir transformatif mengarah kepada pola sikap yang dinamis. Sehingga nantinya mampu mewujudkan sosok pribadi yang memiliki kualitas taqwa, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab. Pengedepanan pengembangan kader harus ditunjang dengan pola kaderisasi yang kondusif dan tersistem dengan memperhatikan tingkat objektif kebutuhan kader. Penguatan harus dimulai dari proses rekrutmen yang didasarkan tidak hanya pada keinginan untuk menambah kuantitas kader, tetapi lebih terfokus pada pemberdayaan yang mengarah pada kualitas kader. Dengan begitu itu PMII harus menjadi “kawah candradimuka” untuk membangun eksistensi dirinya menuju kader kualitatif seperti yang diharapkan.

Tanggung jawab PMII terhadap kadernya adalah konsekwensi yang harus ditanggung untuk memberikan penguatan kader. Sudah semestinya PMII menjadi alat untuk kader-kadernya menembus jenjang masa depan sesuai dengan kebutuhan pilihan hidup kader. Oleh karena itu identitas PMII harus dikenal secara utuh, baik itu namanya karakternya, keberpihakannya, ataupun tradisi yang dikembangkannya. Kualitas PMII harus dikedepankan agar masyarakat mempunyai suatu keyakinan bahwa PMII adalah organisasi yang bisa diharapkan baik dari sisi intelektualitasny, komitmen sosialnya, maupun profesionalitasnya. Segmen perjuangan PMII harus digalang pada tiga hal. Pertama, level atas, negara (pemerintah) sebagai penentu kebijakan. Kedua, level tengah organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, serta kekuatan strategis lainnya. *Ketiga*, di tingkat bawahmasyarakat umum dan kaum dhu’afa sebagai keberpihakan basis gerakan.

Hal ini dilakukan agar paham pluralitas dan inklusivitas terserap dalam ranah kehidupan kebangsaan dan keislaman yang menjadi tujuan organisasi PMII. Berbagai bentuk strategi bisa digunakan asalkan strategi tersebut tetap berporos kepada prinsip-prinsip dasar dan agenda perjuangan PMII. Prinsip dasar ini merupakan peneguhan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sispil, pencerahan dengan melakukan pembebasan, dan mendorong percepatan proses demokratisasi. Sasaran yang digunakan adalah dengan menempatkan posisi PMII sebagai kekuatan moral dan kekuatan penekan yang mampu mempengaruhi jalannya perubahan. Hal ini harus intens dilakukan dan diperjuangkan

untuk mempengaruhi pendapat publik (public opinion), ataupun dengan cara-cara yang lain yang dianggap efektif. Untuk itu ada tiga aspek penting untuk mengedepankan pengembangan perjuangan lebih bermakna dan terarah.

1. **Ideologi Gerakan Sebagai Penguat**

PMII selama ini mendasarkan dan menyandarkan pada ideologi dan wacana kritis sebagai upaya pembacaan terhadap realitas sosial dan keberpihakan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan, dan perjuangan terhadap nilai-nilai universal (keadilan, persamaan, kesetaraan, solidaritas, pluralisme dan lainnya). Penguatan ideologi harus ditekankan agar gerakan PMII mempunyai kekuatan yang terarah dan konsisten. Penguatan ideologi harus bersifat membantu dan mengarahkan nilai perjuangan, bukan sebaliknya. Fungsi ideologi tidak hanya membantu dan mengarahkan, tetapi kadang juga menjadi perintang. Ide ideologisebagai perintang gerakan disebabkan ide yang dijadikan pedoman telah menjadi sistem yang menghasilkan perilaku yang mempertahankan tatanan yang ada.

Ideologi mempunyai kekuatan merintangi apabila ia telah menjadi kekuatan yang mengendalikan tata pikir, tata bicara, dan tata tindak dari setiap anggotanya. Ideologi harus mampu memotivisir individu agar terlibat dalam proses perubahan. Oleh karena itu ideologi harus menjadi pengarah untuk meretas perubahan sesuai bayangan masa depan. Dengan adanya penguatan ideologi PMII akan membuat gerakan PMII lebih bermakna.

2. **Desentralisasi Gerakan**

Desentralisasi sebagai komponen penting dalam gerakan sosial pemberdayaan masyarakat mempunyai arti strategis karena akan membuka peluang yang lebar kepada masyarakat dalam perumusan dan pemantauan kebijakan pemerintah atau organisasi. Suatu gerakan sosial organisasi massa yang terdesentralisasi akan semakin besar potensi pemberdayaan warga anggota organisasi. Ada dua fungsi desentralisasi gerakan.

Pertama, agar sesuai dengan kepentingan lokal, yaitu gerakan sosial harus disesuaikan dengan masalah dan potensi daerah, dan harus melibatkan keterlibatan anggota dalam keputusan organisasi. Semakin terdorongnya desentralisasi gerakan sosial PMII akan mendorong *political equality* (kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan), *accountability* (meningkatkan tanggung jawab), *responsiveness* (peningkatan pelayanan sosial organisasi).

Kedua, fungsi pengadministrasian, yaitu mengurangi kemacetan organisasi di pusat dan meningkatkan pengadministrasian wewenang gerakan sosial pusat di daerah. *Pertama*, dalam gugus ideal gerakan PMII diikat dengan pemikiran dan kesadaran bersama sebagai upaya menyederhanakan konflik. Dari pemikiran bersama ini akan memunculkan paradigma dan ideologi gerakan untuk membentuk tingkah laku bersama. *Kedua*, gerakan sosial butuh kampanye untuk mensosialisasikan ide dan kesadaran sosialnya. Oleh karena itu kampanye sebagai strategi harus dilakukan untuk meraih dukungan, baik melalui komunikasi, negosiasi / pun mobilisasi.

3. **Kompetisi dan Konflik Sebagai Penyemangat**

Kompetisi adalah pendorong organisasi agar dinamis, memaksa oraganisasi meningkatkan laju perubahan program dan tingkat keterampilannya. Kompetisi juga merupakan faktor yang menimbulkan kreatifitas dan inovasi. Harapan masa depan yang dirumuskan bersama akan selalu menunggu kader-kader yang kreatif di berbagai bidang.

Konflik berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat realitas sosial. Konflik berperan penting dalam mensukseskan gerakan sosial. Berlawanan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, konflik internal dalam gerakan sosial akan berdampak positif untuk mencapai tujuan gerakan bersama. Konflik internal akan fungsional bila tujuannya adalah mempercepat gerakan dan peruahan sosial masyarakat.

4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Untuk mencapai masyarakat komunikatif yang diangan-angankan dalam sebuah masyarakat sipil, peran teknologi terutama teknologi informasi sangat besar artinya. Teknologi menciptakan beberapa alternatif pilihan

gerakan. Teknologi baru akan membawa cita-cita yang sebelumnya tidak dapat dicapai ke alam kemungkinan dan dapat mengubah kesulitan relatif atau memudahkan menyadari nilai-nilai yang berbeda. Dengan adanya inovasi teknologi masyarakat mempunyai banyak alternatif, dan jika ia memilih alternatif baru, maka ia memulai perubahan besar di berbagai bidang.

D. Aplikasi Strategi Pengembangan PMII

Sandaran terhadap wacana kritis, pengembangan organisasi, dan pengembangan perjuangan, maka dibutuhkan target-target sebagai hasil pencapaian dari cita-cita yang diinginkan. Pencapaian target merupakan proses logis manakala didalamnya terjadi silogisme, deduksi atau induksi. Apabila mengacu kepada fakta-fakta di dalam PMII saat ini dan masa lalu dengan serentetan sejarah gerakannya, makia induksi dealektika target yang dicapai akan tergambar. Demikian pula sebaliknya, ketika paradigma masa lalu dan saat ini sebagai acuan maka target apa yang dicapai juga akan tergambar. Sebab dua dealektika ini, secara jelas menggambarkan sebuah proses hepotesis empiris PMII, antitesis terhadap paradigma gerakan yang akan terlahir pada setiap generasi, dan sintesis kebaruan paradigma yang terus menerus. Dari sinilah dapat dibaca target yang mewujud dengan pedoman model wacana yang dikembangkan mekaisme apa yang dijalankan, dan barometer apa yang digunakan.

Pertama, pengawalan PMII terhadap moralitas bangsa sebagai bentuk keberpihakan riil masa depan. Keterbukaan, keseteraan dan keterlibatan dalam kancah kebangsaan merupakan pencapaian target PMII dari paradigma yang dikembangkan. Bangunan kebangsaan terbuka harus dilakukan sebagai upaya counter wacana atas pola masyarakat tertutup. Paradigma keterbukaan sebagai sebuah target gerakan PMII dapat dipandang sebagai sebuah model teoritis yang tata hubungannya bersifat konstraktual di mana ekstensi institusi dengan keanggotaannya wajib atau terbatas tidak mempengaruhi interpretasi ini. Kebebasan perseoranagan terjamin selama ada beberapa insitusi berbeda yang setara terbuka bagi setiap orang hingga dia dapat memilih salah satu yang akan dimasukinya.

Kesetaraan menyangkut aspek kesadaran yang mampu berbagi kepada yang lain. Pencapaian dari kesataraan akan memunculkan keberdayaan. Emansipasi yang berarti pada pengangkatan merdeka dari hambatan atau mengeluarkan diri dari segala himpitan menuju gerak yang merdeka adalah strategi yang merespon atas situasi-situasi. Situasi yang menkungkungi dan mewujud dalam ketidakberdayaan merupakan hegemoni atas gerak dari keterbukaan, kesetaraan dan emansipasi akan mendasari gerakannn pada kekuatan konseptual dan profesionalitas. Dengan demikian warga merupakan ruh komunal yang padanya mewujud proses discurve-formation yang memberikan kebebasan dan menerima segenap eksplorasi pemikiran. Keadaan ini dapat tumbuh bila dihadapkan pada realitas sosial, utamanya kebobrokan sistem budaya dan warga PMII harus selalu menjarak dengan segala bentuk kemapanan.

Kedua, individu, group dan struktur sosial. Individu menjadi penting di dalam PMII, karena gerak paradigma yang mewujud dalam ekstensi tiap warga PMII adalah resonansi dari paradigma yang empiris berjalan dalam diskursus pergerakan. Tipologi indiividu yang menebar dalam ragam wacana, subsistem karakter wacana yang berkembang menempatkan proses perkaderan sumber daya manusia harus diproses secara laten untuk menciptakan hulu teknologi wacana dan muaranya nanti pada peran-peran sosial. Penguatan kualitas individu melalui pendidikan formal maupun informal sebagai kekuatan profesionalitas nantinya mampu mendobrak dan menghasilkan penataan kembali terhadap sistem intelektualitas, pola bergaining pada tingkat negara dan sistem relegiusitas menyadarkan bagaimana sistem kepercayaan dalam tradisi keagamaan dapat menjadi nilai transformatif yang membebaskan.

Sementara group sebagai sistem yang dapat diidentifikasi sebagai subsistem terorganisasi yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya menutut komitmen-komitmen pencapaian target. Lewat group inilah pencapaian target PMII dapat diwujudkan. Suatu gorup dapat mencapai target keseluruhan dalam suatu hubungan yang kompleks

manakala terdapat perangkat bangunan target lewat gorup yang saling terkait. Bangunan target lewat gorup dalam sistem pergerakan PMII bisa melalui delegasi kepanitiaan dalam aktivitas PMII maupun dalam aktivitas institusi lainnya.

Struktur sosial dapat diidentifikasi sebagai subsistem yang terorganisasi yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur sosial selalu mempertahankan batas-batas yang memisahkan dan membedakan dari lingkungan lain. Pencapaian target melalui struktur sosial adalah bagaimana kader PMII mamp mentransformasi nilai, wacana, paradigma dalam situasi sosial.

Target pencapaian ini harus didukung dengan proses implementasi yang lebih operasional. Dibutuhkan agen untuk mensososialisasikan apa yang dimiliki PMII kepada basis-basis sosial baik internal maupun eksternal. *Pertama*, kelompok strategis sebuah kekuatan yang memiliki bergaining position. Dalam wilayah PMII bisa dipetakan pada wilayah internal dan eksternal. Keberadaan struktur kepengurusan dalam sebuah organisasi memiliki konsekuensii terhadap jalannya organisasi. Dalam PMII pengurus sebagai pengelola organisasi memiliki kewenangan untuk menjadi agen sosialisasi wacana dan sekaligus di dalamnya sebagai penggerak dari ide-ide yang hendak diaktualisasikan. Oleh karena itu pengawalan yterhadap institusi dan memberikan penguatann menjadi sangat penting. Visi harus sama yang dimanefestasikan pada pola-pola kerja-kerja keorganisasian. Visi yang tidak sama akan menggulingkan organisasi pada perjalanan yang tidak terarah. Selain organ di dalam PMII, organ di luar PMII merupakan wilayah yang harus dirambah dalam pola strategi gerakan sebagai agen. NGO's (LSM), kelompok diskusi, kajian, penelitian dan kelompok-kelompok masyarakat merupakan wilayah mitra dalam membangun siinergisitas bangunan PMII.

Kedua, partisipasi warga. Keterlibatan warga dalam gerak langkah PMII merupakan hal penting dalam keberlangsungan organisasi. Dalam konteks ini partisipasi warga adalah bagiamnan kemandirian agar dapat terbangun dari kesadaran yang tumbuhhh dari pemahaman komprehensif terhadap ruh gerakan. Sebagaii agen, partisipasi warga diharapkan mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan misi pergerakan. Keterlibatan warga PMII sebagai jaminan bagaimana rumusan-rumusan yang ada dalam wacana kritis, komitmen sosial dan kemanusiaan bisa dijalankan dengan kemandirian.

Metode yang digunakan adalah non violence, konfrontatif dan koorporatif non kooptasi. *Pertama*, anti kekerasan adalah melakukan perubahan yang paling substansial dalam semangat kemanusiaann tanpa kekerasan. Karenanya sebagai aktualisasi visi yang dikembangkan PMII, pendekatan model anti kekerasan adalah salah satu pilihan alternatif dalam konteks penghargaan atas hak asasi manusia. *Kedua*, seringkali untuk menyelesaikan kontradiksi bangunan struktur sosial lama menuju bangunan struktrur sosial baru, cara konfrontatif merupakan susatu hal yang tidak terelakkan. Ini akibat lemahnya kekuatan struktural dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami di masyarakat, padahal masyarakat ingin perubahan secara cepat. *Ketiga*. kooperatif non kooptasi. Metode kooperatif adalah merupakan cara efektif untuk mempengaruhi pihak lain dengan prinsip *win-win solution*. Metode kooperatif harus didasari dengan konsep, sikap kemandirian, dan kedewasaan melakukan hubungan dengan pihak lain. Dengan kekuatan ini kooperatif yang dilakukan tidak menjebak kepada kooptatif baik terhadap dirinya maupun kepada pihak lain.

Catatan : ....

....

....

....

....

MATERI 4

ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR DAN HAROKAH

A. Paham Keagamaan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Secara terminologis Ahlussunnah Wal Jama'ah Menurut Syekh Abu al-Fadl ibn Syekh 'Abdus Syakur al-Senori adalah kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi saw. dan thariqah (jalan) para sahabatnya dalam hal akidah (tauhid), amaliyah fisik (fiqh), dan akhlaq batin (tasawwuf).

Secara historis, para imam Aswaja di bidang akidah telah ada sejak zaman para sahabat Nabi saw. sebelum munculnya paham Mu'tazilah. Imam Aswaja pada saat itu di antaranya adalah 'Ali bin Abi Thalib ra., karena jasanya menentang pendapat Khawarij tentang *al-Wa'd wa al-Wa'îd* dan pendapat Qadariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Di masa tabi'in ada beberapa imam, mereka bahkan menulis beberapa kitab untuk mejelaskan tentang paham Aswaja, seperti 'Umar bin 'Abd al-Aziz dengan karyanya "*Risâlah Bâlighah fî Raddi 'alâ al-Qadariyah*". Para mujtahid fiqh juga turut menyumbang beberapa karya teologi untuk menentang paham-paham di luar Aswaja, seperti Abu Hanifah dengan kitabnya "*Al-Fiqh al-Akbar*", Imam Syafii dengan kitabnya "*Fi Tashîh al-Nubuwwah wa al-Radd 'alâ al-Barâhimah*".

Generasi Imam dalam teologi Aswaja sesudah itu kemudian diwakili oleh Abu Hasan al-Asy'ari (260 H – 324 H), lantaran keberhasilannya menjatuhkan paham Mu'tazilah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah Aswaja secara substantif telah ada sejak masa para sahabat Nabi saw. Artinya paham Aswaja tidak mutlak seperti yang dirumuskan oleh Imam alAsy'ari, tetapi beliau adalah salah satu di antara imam yang telah berhasil menyusun dan merumuskan ulang doktrin paham akidah Aswaja secara sistematis sehingga menjadi pedoman akidah Aswaja.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, istilah Aswaja secara resmi menjadi bagian dari disiplin ilmu keislaman. Yang dimaksud adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Istilah Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai suatu paham sebenarnya belum dikenal pada masa al-Asy'ary (260-324 H/873-935 M), tokoh yang dianggap sebagai salah seorang pendiri paham ini. Bahkan para pengikut al-Asy'ary sendiri, seperti al-Baqillani (w. 403 H), alBaghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H) juga belum pernah menyebutkan term tersebut. Pengakuan secara eksplisit mengenai adanya paham Aswaja baru dikemukakan oleh *az-Zabidi* (w. 1205 H) bahwa apabila disebut Ahussunnah Wal Jama'ah maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi (w. 333 H/944 M). Lebih lengkap lagi Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata: Jika Ahlussunnah wal jama'ah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut rumusan yang digagas oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Dalam fiqh adalah mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di antara teks-teks Hadits Aswaja adalah: *Dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan. Dan terpecah umat Nasrani menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu." Berkata para sahabat, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. Menjawab, "Mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku."* Jadi inti paham Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) seperti yang tertera dalam teks Hadits adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Nabi saw. dan petunjuk para sahabatnya.

B. Rumusan Baru Aswaja

Sampai pada perkembangan terakhir, aswaja masih didefinisikan sebagai berikut : "Paham keagamaan yang dalam bidang Fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dalam bidang Aqidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan dalam bidang Tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junayd al-Baghdady." Definisi tersebut sebenarnya merupakan penyederhanaan dari konsep keberagamaan bermadzhab dengan

tujuan untuk melestarikan, mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan paham Ahlussunnah Waljamaah. Hal tersebut bukan berarti menyalahkan mazhab-mazhab *mu'tabar* lainnya, melainkan NU sebagai organisasai yang mengkoordinasikan para pengikut paham aswaja, berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas metode dan produknya, maka warga akan lebih terjamin berada di jalan yang lurus.

Di luar pengertian di atas, KH. Said Agil Siradj memberikan pengertian lain. Menurutnya, Ahlussunnah Waljamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Baginya Ahlussunnah Waljamaah harus diletakkan secara proporsional, yakni Ahlussunnah Waljamaah bukan sebagai mazhab, melainkan sebuah *manhaj al-fikr* (pendekatan berpikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu. Namun harus diakui bahwa kelahiran Ahlussunnah Waljamaah sebagai *manhaj alfikr* tidak terlepas dari pengaruh tuntutan realitas sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dari pengertian di atas terdapat dua konsep utama, aswaja sebagai *madzhab fiqih* dan aswaja sebagai *manhaj al-fikr dan harokah.* Perbedaan mendasar antara keduanya, konsep pertama meletakkan fiqih sebagai sebuah kebenaran ortodoksi, sedangkan konsep kedua menempatkan fiqih sebagai strategi untuk melakukan interpretasi sosial (Badrun, 2000).

Berbeda dengan konsep *aswaja* sebagai *manhaj al-fikr,* yang belakangan dikembangkan juga sebagai *manhaj al-amal /harokah* (pendekatan melakukan kegiatan), *aswaja* diposisikan sebagai metode berpikir dan bertindak yang berarti menjadi alat *(tools)* untuk mencari, menemukan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Sebagai alat, maka sikap pro aktif untuk mencari penyelesaian menjadi lebih bersemangat guna melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dan orisinil. Dalam hal ini pendapat para ulama terdahulu tetap ditempatkan dalam kerangka *lintas-komparatif,* namun tidak sampai harus menjadi belenggu pemikiran yang dapat mematikan atau membatasi kreativitas. Menurut Badrun (2000), terdapat lima ciri yang perlu diperhatikan dalam memosisikan *aswaja* sebagai *manhaj al-fikr* atau *manhaj al-harokah* : 1. Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru; 2. Makna bermadzhab diubah dari bermadzhab secara tekstual *(madzhab qauly)* menjadi bermadzhab secara metodologis *(madzhab manhajy)*; 3. Melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok *(ushul)* dan mana yang cabang *(furu')*; 4. Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif; 5. Melakukan pemahaman metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalahmasalah sosial dan budaya.

Rumusan aswaja seperti itu memberi peluang untuk melakukan terobosan baru dalam menyikapi berbagai perkembangan sosial, ekonomi, politik maupun budaya menjadi terbuka lebar. Proses akomodasi aneka ragam *(pluralitas)* permasalahan akan berjalan sejalan dengan tuntutan perubahan. Hal ini menjadi daya tarik bagi generasi muda kita untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan berekspresi. Munculnya pemahaman aswaja sebagai *madzhab manhaj* sesungguhnya sebuah pemahaman kembali terhadap esensi "realitas teks-teks" (sumber rujukan) hukum Islam. Menyadari bahwa realitas teks sebenarnya tidak pernah netral, selalu berhubungan dengan motif-motif dibalik turunnya teks atau yang dikenal sebagai *asbabun al nuzul* atau *asbabun al wurud.* Dibutuhkan pemahaman mendalam hal-hal yang melingkupi proses turunnya teks sehingga melahirkan ketentuan hukum. Ketika hukum dirasa tidak lagi berkesesuaian dengan realitas sosial, maka dibutuhkan kembali kontekstualisasi perumusan hukum dengan memperhatikan apa esensi tujuan hukum *(maqasid asy-syari'ah).* Untuk memenuhi hal itu **kaderisasi aswaja** menjadi salah satu alternatif yang mesti dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kekosongan kader.

C. Prinsip Aswaja Sebagai *Manhaj*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. Bidang Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah* diantaranya yang *Pertama* adalah aqidah *Uluhiyyah* (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT. Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. *Pilar yang kedua* adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya, yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. *Pilar yang ketiga* adalah *Al-Ma'ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (*yaumul jaza'*).

2. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan *Syi'ah* yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara *(imamah)*, Ahlussunnah wal-jama'ah dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif *(fardhu kifayah)*. Pandangan *Syi'ah* tersebut juga berbeda dengan golongan *Khawarij* yang membolehkan komunitas berdiri tanpa *imamah* apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *ahlussunnah wal jama'ah*, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama *(mashlahah musytarakah)*. *Ahlussunnah wal-Jama'ah* tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negaramodern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a) **Prinsip Syura (musyawarah)** : Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut: *"....... Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; ......" (QS Al-Syura, 42: 36-39).*

b) **Prinsip Al-'Adl (Keadilan)** : Salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan. *"...... supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu...." (QS An-Nisa, 4: 58).*

c) **Prinsip Al-Hurriyyah (kebebasan)** : Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan *Al-UshululKhams* (prinsip yang lima), yaitu:

- ✓ *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara, yang berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- ✓ *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.

- ✓ *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- ✓ *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu.
- ✓ *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- ✓ *Hifzh al-'Irdh;* jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam dunia modern – bahkan mungkin di kalangan *ahlussunnah waljama'ah*. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

d) **Prinsip Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)** : Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain (QS. Al-Hujuraat, 49: 13). Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT (QS. Al-Maidah: 48) Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah bagi Ahlussunnah wal-Jama'ah. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan – baik negara maupun kerajaan – harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. Bidang Istinbath Al-Hukm *(Pengambilan Hukum Syari'ah)*

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Sebagai sumber hukum *naqli* posisinya tidak diragukan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Sahabat dan Tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus *(mutawatir),* terkenal *(masyhur)* ataupun terisolir *(ahad).*

Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh *Ijma' Shahabah*. Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Ijma'* adalah *Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.* Dalam Al-Qur'an dasar *Ijma'* terdapat dalam (QS An-Nisa', 4: 115) *dan* (QS Al-Baqarah, 2: 143). *Qiyas*, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil *ijtihad* para Ulama. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum. *Qiyas* sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

4. Bidang Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan “Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun.” Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah… Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah.” *“berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun”* kata Imam Al-Junaid, lalu *“menyucikan hati dari apa saja selain Allah…. Mereka* (kaum Sufi) *telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,”* kata Imam Al-Ghazali.

Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya (Zuhud). *Zuhud* harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan. Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa’id Al Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik.

Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

D. Hasil Akhir

Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai *manhaj al fikr dan manhaj al-harokah* bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namunpun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi. Sebagai metode berpikir, boleh jadi pada saatnya nanti Aswaja akan memiliki kadar teknikalitas sama tinggi dengan metode ilmiah.

Catatan : ....

....

....

....

MATERI 5

ISLAM SEBAGAI TEOLOGI PEMBEBASAN

A. Pengantar

Berbicara tentang teologi pembebasan dalam diskusi-diskusi resmi atau tak resmi memang terasa problematik. Seringkali diskusi seperti ini dicurigai sebagai gerakan pemikiran kekiri-kirian yang diasosiasikan dengan pendukung komunisme atau dianggap menyebarkan pemikiran subversif. (khususnya pada era Orde Baru lalu). Setelah Orba jatuh dan kebebasan berpikir mulai terbuka diskusi semacam ini juga dianggap tabu dan dipandang dengan mata sinis oleh sebagian kalangan. Rupanya persepsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya kesalahpahaman mengenai term teologi pembebasan *(liberation theology)* itu sendiri. *Kedua*, karena teologi pembebasan adalah terminologi yang lahir dari tradisi Kristiani, khususnya di Amerika Latin, dan tidak pernah dikenal secara eksplisit dalam khazanah pemikiran Islam. Dan *ketiga*, karena teologi pembebasan sedikit banyak diinspirasikan oleh ideologi kiri dari pemikiran Marxisme yang dalam sejarah perpolitikan Indonesia dianggap memiliki cacat yang tak termaafkan setelah peristiwa G 30 S.

Aliran teologi kontemporer Teologi pembebasan bukanlah sebuah aliran teologi negatif yang ditakuti menantang dunia. Adanya orang memandang sebagai Islam kiri, Islam progresif khazanah. Kesemuannya hanyalah sebutan, yang jelas mereka bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta benar-benar fokus dan maju dibidang kajiannya untuk memperjuangkan nasib manusia yang terengut. Secara praktis teologi klasik walaupun berdasarkan atas penafsiran terhadap wahyu Allah dan Sunnah berhubungan dengan ketuhanan, keimanan, takdir, dosa, kafir, imamah, khalifah dan perbuatan-perbuatan manusia, ternyata pandangan ini tidak bisa memberi motivasi tindakan dalam menghadapi kenyataan kehidupan konkrit manusia. Sebab, format atau penyusunan teologi tidak didasarkan atas kesadaran murni dan nilai-nilai perbuatan manusia. Karena itu, perlu ada rekonstruksi terhadap teologi Islam sehingga semangat teologi pembebasan dan teologi lingkungan yang merupakan perintah ajaran Islam dapat terwujud.

Munculnya gerakan atau paham atau aliran dengan keyakinan yang mantap untuk berbuat dan menerjunkan diri pada tatanan social merupakan deklarasi keimanan yang diterjemahkan atau dioperasionalkan ke dalam masyarakat. Sekiranya mau kita membentangkan catatan sejarah sejak Nabi Muhammad SAW dan dilanjuti oleh ulama-ulama yang setia tetap eksis melakukan gerakan dan inovasi untuk mengayomi, melindungi dan mengawasi masyarakat dan lingkungan. Apa dan bagaimana gerakan serta inovasi aliran teologi kontemporer khususnya teologi pembebasan dan teologi lingkungan, maka melalui ini penulis akan mencoba paparkan sesuai dengan tuntutan silabus sejarah perkembangan pemikiran Islam. Dan untuk diketahui makalah yang ada ditangan saudara-saudara bukanlah buah pikiran fiksi seperti sebuah novel atau roman akan tetapi merupakan pemikiran yang sudah diakui kelayakan dan teruji serta berdasarkan wahyu.

B. Definisi Teologi Pembebasan

Secara Etimologi Teologi (bahasa Yunani , theos, "Allah, Tuhan", logia, "kata-kata," "ucapan," atau "wacana") adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan ("Teologi dan agama-agama lain diluar agama Kristen"). Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi dapat dipelajari sekadar untuk menolong sang teolog untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, atau untuk menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi atau dengan maksud untuk melestarikan atau memperbarui suatu tradisi tertentu, atau untuk

menolong penyebaran suatu tradisi, atau menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alas an lainnya.

Kata 'teologi' berasal dari bahasa Yunani klasik, tetapi lambat laun memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latinnya oleh para penulis Kristen. Karena itu, penggunaan kata ini, khususnya di Barat, mempunyai latar belakang Kristen. Namun demikian, di masa kini istilah ini dapatdigunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Di lingkungan agama Kristen sendiri disiplin 'teologi' melahirkan banyak sekali sub-divisinya. Pada Abad Pertengahan, teologi merupakan subyek utama di sekolah-sekolah universitas dan biasa disebut sebagai *The Queen of the Sciences*. Dalam hal ini ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi.

Pada mulanya istilah teologi pembebasan atau liberation theology diperkenalkan oleh para teolog Katolik di Amerika Latin pada pertengahan abad lalu. Para teolog ini mau membedakan antara metode teologi pembebasan dengan teologi tradisional. Teologi tradisional adalah teologi yang membahas tentang Tuhan sematamata, sementara teologi pembebasan adalah cara berteologi yang berasal dari refleksi iman di tengah realitas konkrit yang menyejarah. Yakni teologi yang memprihatini nasib dan solider kepada mereka yang menderita ketidakadilan, kalah, miskin, ditindas dan menjadi korban sejarah; teologi yang mau mentransformasikan dunia. Atau dalam ungkapan Gustavo Gutierrez di dalam bukunya Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16 yang berbunyi:

> *This is a theology which does not stop with reflecting on the world, but rather tries to be part of the process through which the world is transformed. It is theology which is open in the protest against trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the vast majority of humankind, in liberating love, and in the building of a new, just, and comradely society to the gift of the Kingdom of God.* (Ini teologi pembebasan] adalah sebuah teologi yang tidak hanya merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi terhadapnya. Ia [teologi pembebasan] adalah teologi yang berupaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan).

Ada banyak macam penamaan yang secara subtansial amat dekat dengan gagasan teologi pembebasan ini, diantaranya: teologi pemerdekaan (Romo Mangun), teologi Kiri (Kiri Islam ala Hassan Hanafi), teologi kaum mustadh'afin, teologi kaum tertindas, dan lain-lainnya. Masing-masing penamaan ini hendak mengartikulasikan suatu cara beragama yang otentik, yang lahir dari situasi, sejarah dan keprihatinan atas penderitaan kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu dengan pengertian tersebut jelas sekali teologi pembebasan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bebas semau gue atau sikap permisif sebagaimana yang sudah disalahpahami. Anggapan seperti itu tentu saja salah alamat dan menunjukkan suatu kebodohan yang tak bermakna.

C. Teologi Pembebasan Islam Menurut Pemikiran Para Tokoh

1. Ali Syariati dan Humanisme Islam

Ali Syariati adalah seorang sarjana muslim yang disebut-sebut sebagai seorang ideolog revolusi Islam di Iran. Ia melahap habis pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, dan secara cerdik menggunakan hazanah tersebut secara kritis untuk menganalisis kondisi sosial politik umat Islam. Usaha besar Syariati terletak pada upayanya untuk membeberkan kekhususan ideologi dan kebudayaan Islam, yang dengan demikian menunjukkan terdapat beberapa asas pokok pembebasan dalam agama Islam. Ali Syariati menganalisis bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat nilai-nilai humanisme sejati yang bersifat ilahiyah sebagai warisan budaya moral dan keagamaan. Manusia adalah makhluk yang sadar-diri, dapat membuat pilihan-pilihan dan dapat menciptakan, sehingga di

sepanjang sejarah umat manusia berusaha merealisasikan nilai-nilai humanisme tersebut meski yang didapatinya adalah kegetiran dan petaka saat melawan kekuasaan jahat dan penindas.

Dalam pandangan Ali Syariati semua ideologi dunia ini telah gagal membebaskan manusia dan sebaliknya menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan penindasan baru pula dalam ungkapan dan sarana yang berbeda. Karenanya untuk mengatasi problem sosial ini harus dicari jalan baru, sebuah jalan ketiga yang menurut Ali Syariati bisa diperankan oleh Islam. Dalam konteks ini Ali Syariati nampaknya memimpikan lahirnya nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru yang diperankan oleh para pemimpin spiritual atau intelektual sebagai para pemikir bebas yang telah memperoleh pencerahan. Ali Syariati membubuhkan spirit pembebasan Islam dalam sebuah bait doa dalam Martyrdom berikut ini:

Ya Allah, Tuhan orang-orang yang terampas! Engkau hendak merahmati, Orang-orang yang terampas di dunia ini, Orang kebanyak yang bernasib tak berdaya, Dan kehilangan hidup, Orang yang diperbudak sejarah, Korban-korban penindasan, Dan penjarahan waktu, Orang-orang celaka di atas bumi ini, Menjadi pemimpin-pemimpin umat manusia, Dan pewaris-pewaris bumi, Sekarang sudah tiba waktunya, Dan orang-orang terampas di atas bumi ini, Merupakan pengharapan akan janji-Mu.

2. Hassan Hanafi dan Kiri Islam

Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo. Pendidikan di awali 1948. Sejak kecil ia mengetahui pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok dan aktivitas sosialnya. Adapun karya Hanafi, Kiri Islam (Al-Yasar Al-Islami) merupakan salah satu puncak sublimasi pemikirannya sejak revolusi 1952. Kiri Islam adalah gerakan transformasi sosial untuk mengubah kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif dalam rangka menyuarakan mayoritas yang diam di antara umat Islam, membela kepentingan seluruh umat manusia, mengambil hak-hak kaum miskin dari tangan orang-orang kaya, memperkuat orang-orang yang lemah dan menjadikan manusia sama dan setara. Salah satu elemen revolusionernya bisa ditemukan dalam Qur'an berbunyi: Dan Aku menghendaki kemenangan orangorang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan pewaris-pewaris (Al-Qashash: 5)

Adapun pokok pemikirannya antara lain: Kritikan terhadap teologi tradisional, Umat Islam hendaknya orientasi perangkat konseptual system kepercayaan (teologi) sesuai dengan perubahan konteks politik terjadi. Umat Islam mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran sepanjang priode kolonialisasi karena mengikuti klasik, untuk itu perlu diubah berpola kepada kerangka koseptual baru yang berasal dari modern. Kegagalan para teologi tradisional disebabkan oleh sikap para penyusun teologi yang tidak mengaitkan dengan kesadaran murni&nilai perbuatan manusia.

Teologi Islam klasik yang membicarakan ilmu ketuhanan yang tidak usah dipersoalkan akan tetapi hendaknya rekonstruksi, artinya membangun kembali sehingga terpungsi teologi itu menjadi ilmu-ilmu yang berguna bagi masa kini, menjadi solusi dari masalahah umat, bukan menjadi dogma-dogma keagamaan yang kosong, akan tetapi menjelma ilmu tentang pejuang sosial. Hal ini senada yang dikatan oleh Zuhairi Misrawi, doktrin keagamaan mestinya dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada persoalan kemanusiaan, mengotekstualisasikan teologi dengan problem kemanusian. Adapun melatar belakangi diperlukan rekontruksi teologi menurut Hanafi adalah sebagai berikut:

"Kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas ditengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu kepentingan ini adalah memecahkan problem penduduk tanah di Negara-negara Muslim. Kepentingan teologi

yang bersipat praktis (amaliyah fi'liyah) yaitu secara nyata diwujudkan dalam realita tauhid dalam dunia Islam. Hanafi menghendaki adanya teologi dunia yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah satu orde".

3. Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Qur'an

Asghar Ali Engineer lahir di Bombay, India 1939. Beliau ini ahli teologi yang terdidik, disamping tekun membicarakan tentang pembebasan juga terlibat gerakan HAM dan usaha untuk meningkatan keselarasan antara agama. Menurut Engineer sebagaimana dikutip Dayan lubis, bahwa tiga alasan upaya pembebasan: "Pertama: Islam, terutama teologi Islam selama ini berkembang tidak relevan lagi dengan konteks social yang ada. Kedua: Teologi itu pasti mengalami demistified dari apa yang sebenarnya dimaksudkan Islam Ketiga: Mengembalikan seperti semula komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan social-ekonomi dan tehadap golongan lemah." Asghar Ali mempertegaskan perjuangan membela dan menegakkan teologi pembebasan merupakan suatu perintah. Hal ini sesuai firman Allah sebagai dalil, (QS. An-Nisa': 75 dan QS. Al-Qashos: 5). Akhirnya dengan dorongan yang kuat memperjuangkan nasib kaum tertindas serta menganggap teologi pembebasan suatu nilai yang suci dan tujuan ilahiyyah. Dan tahun 2004 beliau menerima pengahargaan Nobel Alternatif, The Right Livelihood Awards. Dan perlu dipahami upaya memperbaiki nasib merupakan titah yang harus dijujung tinggi. Hal ini sesuai dengan sinyal dalam Al-qur'an *"Nasib suatu kaum belum akan diperbaiki sebelum kaum itu sendiri memperbaiki nasibnya".*

Lebih jauh secara doktriner, menurut Asghar Ali, ajaran tauhid yang disampaikan Nabi tidak hanya mengandung makna teologis tentang konsep monoteisme Tuhan, tetapi juga memuat makna sosiologis sebagai kesatuan sosial. Argumentasi ini didasarkan pada firman Allah berbunyi: Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang termulia dari antara kamu semua di mata Allah adalah orang yang paling jujur (dan adil). Lebih lanjut kesatuan sosial yang diajukan Qur'an ini bukan hanya bermatra rasial dan etnis, tetapi juga meliputi penghapusan ketidakadilan akibat dari perbedaan ekonomis. Argumentasi ini didasarkan pada dua kata yang digunakan dalam Qur'an yang menyatakan keadilan, yakni adl dan qist. Adl bermakna ganda, bisa berarti keadilan juga bisa berarti menyamakan atau meratakan. Lawannya adalah zulm yang berarti penindasan. Sedangkan qist bermakna distribusi yang sama, yang adil, yang wajar, atau pemerataan. Distribusi yang sama ini juga merujuk pada sumber-sumber daya jasmani, yang juga meliputi distribusi kekayaan sebagaimana dikukuhkan dalam Qur'an. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kamu orang-orang kaya (Qur'an, 59: 7).

D. Hasil Akhir; Teologi Pembebasan Islam sebagai Salah Satu Promotor Gerakan

Mulai penjelasan pertama mengenai Pengertian Teologi Pembebasan, awal munculnya hingga pemikiran-pemikiran tokoh, maka setidaknya dapat dikonklusikan dalam tulisan ini bahwa teologi pembebasan adalah teori ketuhanan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pembebasan kaum tertindas baik secara kultural maupun secara struktural. Setidaknya juga kader pergerakan dapat menjadikannya sebagai bahan dasar untuk penyempurnaan paradigmanya yang sesuai dengan kegunaan, yakni Paradigma Kritis Transformatif atau sama dengan ini yakni Islam dan Teologi Pembebasan Transformatif. Dilihat dari *Pertama*, teologi pembebasan lahir dari pembacaan yang kaya terhadap khazanah pemikiran maupun kebudayaan internal masing-masing agama atau tradisi komunitas tertentu. Dengan menyadari ini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya spirit pembebasan sudah ada dalam pengalaman dalam tiap-tiap agama dan kebudayaan, termasuk dalam agama Islam. *Kedua*, semangat pembebasan hanya mungkin manifes jika perumusan teologi diorientasikan pada solidaritas dan pembebasan terhadap umat manusia yang lemah.

Oleh karena itu dibutuhkan kehendak, kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab setiap individu untuk bersama-sama melakukan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, setara dan manusiawi. Inilah makna teologi pembebasan dalam masyarakat Islam. Praktek ritual adalah penting namun ia memerlukan indikator sosial. Indikator material ibadah yang diterima Tuhan adalah keberhasilannya menegakkan kebenaran dan keadilan (QS. Al Maidah; 8). Sedangkan indikator sosial ibadah yang tidak diterima adalah membiarkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertindasan di sekitar kita. (QS. Al Maa'un).

Kesimpulan yang diambil dari ketiga tokoh diatas (Ali Syariati dan Humanisme Islam, Hasan Hanafi dan Kiri Islam dan Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Al-Qur'an) yang sebenarnya bermaksud sama. Yakni sama-sama menggunakan Ajaran Islam sebagai suatu Teologi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi zaman. Ali Syariati menjelaskan bagaimana sistem Ideologi Besar Dunia (Komunisme dll) yang sempat dikatakan gagal sebab Ideologi tersebut bukan mensejahterakan umat bersama namun sebaliknya malah menimbulkan penindasan-penindasan yang baru sehingga ia berpendapat bahwa untuk mengatasi problem sosial ini harus dicari jalan baru, sebuah jalan ketiga yang bisa diperankan oleh Islam. Hasan Hanafi dan Kiri Islamnya dengan Ketuhanan (Ketauhidan) dan rekontruksi pemikiran-pemikiran baru yang melihat situasi ataupun kondisi umat itu sendiri. Dan Asghar Ali Engineer yang menggunakan konsep elemen pembebasan diambil dari dalam dalil Al-Qur'an.

Akhirnya, hadirnya teologi pembebasan dalam agama-agama sesungguhnya adalah cermin bagi diri umat beragama untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan dan realitas alam yang diwahyukan Tuhan. Karena realitas inilah yang ikut memperkaya wawasan kita tentang iman dan cara berteologi yang relevan dengan konteks zaman. Dalam tulisannya berjudul *Al-din wa al-tsaurah* (Agama dan Pembebasan), Hassan Hanafi tidak saja mengakui bahwa Kiri Islam diilhami oleh momentum kesuksesan Revolusi Islam Iran dan mengklaim sebagai kelanjutan dari jurnal Al-Urwatul Wutsqanya Jamaluddin Al-Afghani yang gigih melawan imperialisme Barat dan berobsesi mempersatukan umat islam. Kiri Islam juga diinspirasikan oleh revolusi agama-agama lain. Seperti revolusi yang terjadi dalam sejarah Yudaisme dan Kristiani, perlawanan Ibnu Uqaibah melawan Romawi, pemberontakan petani di Jerman abad XVI, teologi pembebasan di Amerika Latin dan revolusi Gereja Hitam di Amerika Utara. Selain itu juga revolusi di luar agama-agama monoteis seperti revolusi Budhis di Vietnam, revolusi Konfusionisme di Cina dan revolusi agama-agama Afrika melawan penjajah Kulit Putih di Afrika Utara.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 6

ANALISIS WACANA

A. Terminologi Analisis Wacana

Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasio yang besar dari berbagi definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa. Bagaimana bahasa dipandang dalam analisis wacana? sebelum lebih jauh ada beberapa pengertian terkait dengan analisis wacana itu sendiri, diantaranya yaitu:

- Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan bahasa tulisan. (Sudjiman, 1993:6)
- Wacana : Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversasi atau percakapan. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah. Risalat tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah. (Webster, 1983:522)
- Wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktifitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. (Hawthorn 1992)

Di sini ada beberapa perbedaan pandangan. Mohammad A. S. Hikam dalam suatu tulisannya telah membahas dengan baik perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa ini paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahas dalam analisis wacana, yang akan diringkas sebagai berikut :

- Pandangan pertama diwakili oleh kaum *positivisme-empiris*, oleh penganut aliran ini, bahas dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distori, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sitaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiri. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuansi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari pernyataanya. Oleh karena itu, tata bahasa, kebanaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme-empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama.
- Pandangan kedua, disebut sebagai *konstruktivisme*. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan positivisme-empirisme yang memisahkan subyek dan obyek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang dipisahkan dari subyek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan.
- Pandangan ketiga disebut sebagai *pandangan kritis*. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.

Dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis / CDA*), wacana di sini tidak semata dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang

dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahas dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Menurut *Fairclough dan Wodak*, analisis wacana kritis melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, ia dapat memproduksi dan memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu *common sense*, suatu kewajaran/alamiyah dan memang seperti itu kenyataannya. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Bahan diambil dari tulisan Teun A. Van dijk, Fairclough, dan Wodak.

B. Prinsip dan Pendekatan Analisis Wacana

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiakan wacana sebagai bentuk interaksi. Orang berbicara atau menulis bukan ditafsirkan sebagai ia menulis atau berbicara untuk dirinya sendiri, seperti orang sedang mengigau atau di bawah hipnotis. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Konteks analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Histori, Kekuasaan dan Ideologi dengan bahasa sebagai simbolis yang berarti kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri merupakan bagian integral dari simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kata bersifat simbolis. (Wibowo, 2001: 3-4).

Adapun Pendekatan Analisis Wacana itu *Pertama*, Analisis wacana seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. *Kedua*, Analisis wacana dipandang sebagai aksi, cara melakukan segala hal dengan kata-kata. *Ketiga*, Analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digubakan oleh komunikator aktual dari perspektif mereka. (Littlejohn, 1996: 84-85).

C. Karakteristik Analisis Wacana

- ✓ Analisis wacana lebih bersifat kualitatif dibandingkan analisis isi yang umumnya kuantitatif.
- ✓ Analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat *manifest (*nyata), analisis wacana berpretensi memfokuskan pada pesan *latent* (tersembunyi).
- ✓ Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan "apa yang dikatakan" (*what)* tetapi tidak dapat menyelidiki "bagaimana ia dikatakan" (*how).*
- ✓ Analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi. Karena peristiwa selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama untuk isu dan kasus yang berbeda. (Eriyanto, 2001: 337-341).

D. Peran Analisis Wacana dalam Strategi Gerakan PMII

Sangat sulit sekali jika kita berbicara, kita menulis, kita berdiskusi tanpa ada yang namanya wacana. Wacana yang dimaksudkan disini bukanlah sekedar wacana yang ada di buku ataupun koran bekas ataupun majalah. Tetapi wacana yang dimaksudkan disini adalah wacana dengan sifatnya yang universal, yakni sebuah percakapan khusus atau

komunikasi kebahasaan yang terlihat dengan jelas di antara pendengar dan pembicara sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya serta semua yang ada disekitar kita. Memang begitu, kita semua sudah pasti mengetahui apa itu wacana, tapi kita sangat sulit untuk bergerak dikarenakan wacana juga.

Tidak dapat dipungkiri lagi sahabat, bahwa kita sudah terhegemoni dengan wacana-wacana yang saat ini sedang hangat-hangatnya beredar. Jika kita kembali lagi (BACK AGAIN) meniti sejarah masa lalu, ada banyak sekali wacana-wacana yang seharusnya kita ungkap, ada banyak sekali wacana-wacana yang seharusnya kita kaji ulang, dan ada juga wacana-wacana yang seharusnya di musiumkan, misal jika dihubungkan dengan perasaan atau kegundahan masa lalu. Dan memang begitulah wacana tersebut berkembang, tinggal bagaimana kita menyikapi akan hal tersebut mau menyikapi dengan santai ataupun tergesa-gesa mengambil keputusan.

Dengan demikian, disinilah peran Analisis Wcana dalam wadah Pergerakan. Agar senantiasa tidak langsung mempercayai apa yang dibicarakan orang lain ataupun wacana yang beredar. Tapi lebih detailnya kembali lagi kepada makna Tabayyun atas apa yang sudah terwacanakan.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 7

ANALISIS SOSIAL

A. Terminologi Analisis Sosial

Suatu proses analisis sosial adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada dasarnya "mirip" dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau aspek tertentu. Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi sesungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: kemungkinan apa yang tetjadi.

Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan histories, struktural dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial. Analisis sosial atau yang lebih akrab dikenal ansos ini merupakan sebuah proses atau mekanisme yang akan membahas problematika-probelmatika yang terjadi pada sebuah objek analisa dan pada akhirnya akan menghasilkan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan atas problematika-problematika tersebut. Dari sana, kita dapat menentukan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk dicarikan solusi yang tepat.

Inilah yang acapkali tidak dilalui oleh para *problem solver*. Mereka seringkali menghasilkan solusi atas problematika yang hadir bukan berdasarkan hasil analisis mendalam namun hanya berdasarkan dugaan yang argumentasinya lemah atau bahkan hanya berdasarkan pada kemauannya saja. Mungkin permasalahan yang nyata di lapangan akan terselesaikan, namun karena ia tak akan menyentuh sampai ke akarnya maka akan hadir permasalahan-permasalahan baru atau bahkan permasalahan yang nyata tersebut tidak hilang sama sekali.

Pada dasarnya semua realitas sosial dapat dianalisis, namun dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan yang sesuai dengan perubahan. Secara umum objek sosial yang dapat dianalisis antara lain;

a. Masalah-masalah sosial, seperti : kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminilitas.
b. Sistem sosial, seperti: tradisi, usaha kecil atau menengah, sistem pemerintahan, sistem pertanian.
c. Lembaga-lembaga sosial seperti sekolah layanan rumah sakit, lembaga pedesaan. Kebijakan publik seperti : dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah UU.

Bicara tentang analisis sosial, pada umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendikiawan, ilmuwan atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis social hanya milik "mereka". Masyarakat awam tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan. Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan kepentingan.

Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat atau dinding pemisah itu, dan memberikatmya kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Malahan mereka yang paling dekat dengan suatu kejadian, tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih berpeluang mendekati kebenaran. Dengan demikian, tanpa memberikan

kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat.

Sebab Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa social, Analisa sosial tidaklah bebas nilai, dan Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru.

E. Langkah-Langkah Analisis Sosial

Proses analisis sosial meliputi beberapa tahap antara lain:

1. Memilih dan menentukan objek analisis
   Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional dalam arti realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi.
2. Pengumpulan data atau informasi penunjang
   Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung dilapangan. Recek data atau informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data.
3. Identifikasi dan analisis masalah
   Merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variable, seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komphrehensif diharapkan dapat memahami subtansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek.
4. Mengembangkan presepsi
   Setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan presepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut.
5. Menarik kesimpulan
   Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang; akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial.

Dengan menggunakan pendekatan secara Historis dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periode-periode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap periode. Dan Struktural dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga-lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada.
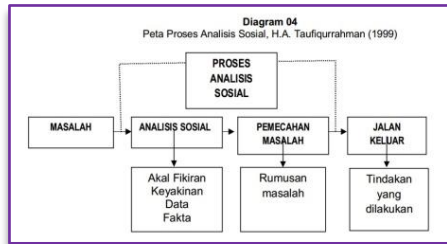
F. Peran Analisis Sosial dalam Strategi Gerakan PMII

Sebagaimana kita ketahui, paradigma gerakan PMII adalah kritis transformatif, artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif (*kritis*), sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial (*transformatif*). Transformasi sosial yang dilakukan PMII akan berjalan secara efektif jika kader PMII memiliki kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial. Kesadaran kritis akan muncul apabila dilandasi dengan cara pandangan luas terhadap realitas sosial. Untuk dapat melakukan pembacaan sosial secara kritis, mutlak diperlakukan kemampuan analisis sosial secara baik. Artinya, strategi gerakan PMII dengan paradigma kritis transformatif akan dapat terlaksana secara efektif apabila ditopang dengan kematangan dalam analisis sosial (ANSOS). Dan adanya Ansos itu sendiri sangat berfungsi:

- Untuk mengidentifikasikan dan memahami persoalan-persoalan yang berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti); berguna untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan.
- Akan dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat.
- Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa demikian).
- Dari hasil analisa sosial tersebut dapat proyeksikan apa yang mungkin akan terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus dilakukan.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 8

ANTROPOLOGI & PENGORGANISASIAN KAMPUS

A. Antropologi dan Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi gerakan mahasiswa menganggap bahwa kader-kadermya seharusnya dapat memahami bahkan membaca kampus mereka sendiri. Hal ini penting sebagai pijakan mereka berproses si bangku perkuliahan. Secara garis besar sudah dipaparkan (kemarin pada waktu MAPABA) bahwa antrologi adalah bidang Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam studi kajian antropologi (manusia) mencakup tentang sejarah, perilaku, bentuk fisik masyarakat, tradisi-tradisi, nilai-nilai dan interaksi antar manusia sampai budaya baru yang dihasilkan karena interaksi tersebut. Kampus sudah diutarakan diatas bahwa tempat sebagai sarana maupun prasarana wahana untuk belajar mahasiswa.

Jadi secara garis besar antropologi kampus adalah kajian ilmu yang mempelajari tetang kebudayaan, perilaku, tradisi, nilai-nilai, interaksi dan lain sebagainya yang dianggap penting dalam dinamika dunia kampus ataupun lingkungan sekitar yang berhubunagn kampus. Esensial Antropologi Kampus Untuk Dunia PergerakanSejarah telah mencatat bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak lepas dari peran serta mahasiswa.

Sedangkan Pengertian pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut :

- Organisasi Menurut Stoner; Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
- Organisasi Menurut James D.Mooney; Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- Organisasi Menurut Chester I.Bernard; Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pengorganisasian adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan kapasitas kesadaran kritis yang teraktualisasi dalam pembentukan organisasi yang merupakan wadah untuk perjuangan kolektif atau lebih dikenal sebagai menumbuhkembangkan organisasi ditingkat akar rumput. Dan pengorganisasian kampus itu sebagaimana proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukan dan mengenalkan ancaman yang ada secara bersama-sama serta bagaimana mencarikan solusinya. Pengorganisasian inilah yang berkaitan dengan pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi lokal mahasiswa.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Yang berarti susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsiatau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

B. Pengembangan Pengorganisasian Mahasiswa

Pola pengembangan Mahasiswa itu dibagi menjadi dua bagian yang saling berintegritas:

1. Pengorganisasian Mahasiswa (Organizing) yang menumbuhkan kesadaran kritis – partisipatif – aktif.
2. Pengorganisasian Mahasiswa (Development) yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan serta penggalian potensi – potensi sosial – kemahasiswaan.

Untuk dapat efektif dan efisien serta berhasil sesuai target dan tujuan, sebuah pengorganisasian kampus harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut :

- Penyatuan Integrasi
- Membangun Kontak atau Jaringan
- Pendidikan Sosial
- Perencanaan Pengorganisasian
- Pembentukan Kelompok Kecil
- Pembentukan Organisasi
- Aksi – Refleksi – Aksi

Dengan teknik yang sesuai, yakni:

1. Penyelidikan : Memahami dan memetakan masalah
2. Pendekatan Personal
3. Mengembangkan Pendidikan Kritis
4. Membuat tindakan bersama : yang membutuhkan Promotor gerakan sebagai penguji komitmen
5. Pembentukan Organisasi

Sebagai Mahasiswa Pergerakan, pengorganisasian juga harus memiliki prinsip-prinsip gerakan sosial kemahasiswaan sebagaimana prinsip itu meliputi :

1. Keberpihakan antar sesama anggota
2. Pendekatan Holistik
3. Pemberdayaan
4. Kemandirian
5. Berkelanjutan
6. Partisipatif
7. Keterbukaan
8. Tanpa Kekerasan
9. Praktis (Aksi – refleksi – aksi)
10. Kesetaraan

Dengan demikian, apa yang menjadi cita-cita pergerakan dalam pengorganisasia kampus itu dapat diwujudkan sesuai harapan, konsep yang telah dibuat dan implementasi yang telah disepakati.

C. Tujuan dan Manfaat Pengorganisasian

Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisiran. Hal menakjubkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah tenyata hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisiran seringkali dikesankan sulit atau bahkan musykil. Tetapi dalam kenyataannnya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantungan pada *ketrampilan dasar* yang sebagian besarnya sebenarnya sudah dimiliki oleh kader/mahasiswa dalam kadar yang sama dan memadai. Memang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisiran, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh kader maupun civitas akademika sekalipun.

Membangun organisasi adalah membangun kepentingan secara bersama–sama pada seluruh elemen di dalam kampus yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan sebuah perubahan sosial kampus. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi sosial, politik dan kebudayaan di dalamnya. Pengorganisasian dalam tata kelola kampus itu ditujukan untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal.

Secara internal tujuan pengorganisasian adalah membangun organisasi di dalam kampus. Sedangkan secara eksternal tujuan pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi kampus untuk menghadapi masalah–masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah menyelesaikan konflik–konflik atau masalah masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik.

Mengorganisir itu mempunyai manfaat dalam *jangka pendek*, yakni suatu alat efektif untuk membuat sesuatu terlaksana; misalkan dalam memperbaiki citra kampus, kontruksi kebijakan yang harus disesuaikan dengan kondisi Mahasiswa, dll. Mengorganisir kampus juga punya manfaat *jangka panjang* yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, mahasiswa yang ada dilingkungan kampus bisa belajar sesuatu yang baru tentang peran dan tanggungjawab dirinya sendiri. Mahasiswa akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, mahasiswa dapat menemukan bahwa kebutuhan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai *karena ketiadaan kepercayaan diri di dalam kampus itu sendiri.* Warga mahasiswa dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian; bagaimana bekerja bersama, menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh secara bersama. Akhirnya, melalui pengorganisasian, mahasiswa di kampus mulai mengenal dan menemukan jati diri mereka sendiri.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 9

PENGELOLAAN OPINI DAN GERAKAN MASSA

A. Pengertian Opini

Seperti ilmu sosial lainnya, definisi opini (pendapat) sulit untuk dirumuskan secara lengkap dan utuh. Ada berbagai definisi yang muncul, tergantung dari sisi mana kita melihatnya, Ilmu Komunikasi mendefinisikan opini sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka. Opini sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula (Bernard Berelson).

Begitupun dengan Opini Publik. Ilmu Psikologi mendefinisikan opini publik sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar (Leonard W. Doob). Sekalipun untuk keperluan teoritik dikenal adanya tiga pendekatan diatas, dalam prakteknya opini publik tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja. Opini publik hanya terbentuk bila ada informasi yang memadai dan warga masyarakat bereaksi terhadap isu tersebut.

Opini publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata
- Dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu, dan reaksi itu diungkapkan
- Masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan
- Dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi
- Yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat
- Opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan
- Partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam.
- Memungkinkan adanya kontra-opini.

B. Proses dan Faktor terbentuknya Opini Publik

Menurut Cutlip dan Center

- Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan.
- Munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternative
- Dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok.
- Untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas.

Menurut Erikson, Lutberg dan Tedin

- Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak
- Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda.
- Ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi
- Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.

Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju, karena kepada para anggota diskusi memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis.

Berdasarkan terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni. Opini publik murni adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah (isu). Sedangkan opini publik yang tidak murni dapat berupa :

- Manipulated Public Opinion, yaitu opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik
- Planned Public Opinion, yaitu opini yang direncanakan
- Intended Public Opinion, yaitu opini yang dikehendaki
- Programmed Public Opinion, yaitu opini yang diprogramkan
- Desired Public Opinion, yaitu opini yang diinginkan

Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Publik, diantaranya :

- Pendidikan: baik formal maupun non formal, banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup, memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan.
- Kondisi Sosial : Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan.
- Kondisi Ekonomi : Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis.
- Ideologi : Hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Merupakan pemikiran khas suatu kelompok.
- Organisasi : Adanya orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan, menyalurkan pendapat dan keinginannya dan cenderung mengedepankan kepentingan bersama.
- Media Massa : Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan.

C. Pengertian Aksi Atau Gerakan Massa

Gerakan atau Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah/pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan pemenuhannya. Secara sosiologis ada tiga kategori kebutuhan: 1] Kebutuhan biologis/primer, yaitu kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan jasmani manusia. Tergolong kebutuhan ini adalah makanan dan minuman, pakaian, bernafas dan istirahat, dan lain-lain. 2] Tergolong kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan biologis/primer. Tergolong kedalam kebutuhan ini adalah pendidikan, rekreasi, komunikasi, hubungan sosial, dan lain-lain. 3] Kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang bersifat kerohanian, supranatural, dan metafisik. Misalnya kebutuhan akan shalat, kebaktian, klenteng, dan lain-lain. Semua kebutuhan teersebut bisa dituntut sesuai dengan tuntutan yang didiskusikan sebelum melakukan aksi.

Setiap manusia memiliki ketiga jenis kebutuhan tersebut, karenanya dalam pemenuhannya harus diatur supaya tidak terjadi penumpukan dan benturan. Peraturan mutlak diperlukan untuk tujuan keseimbangan dalam masyarakat. Peraturan atau hukumlah yang menentukan batasan antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan sosial pranata diperlukan untuk mengatur tata kehidupan antar manusia dalam masyarakat. Pranata sosial menjadi kebutuhan bersama dan karena itu pula harus disepakati bersama serta

dilaksanakan secara konsisten secara bersama-sama pula. Namun demikian, walaupun perwakilan yang duduk pada institusi (trias politika dalam istilah Montesqueu) dipilih rakyat, tidak mustahil dapat terhindar dari penyimpangan terhadap aturan-aturan, membuat aturan untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya, mempertahankan kelangsungan kekuasaan dan mempertahankan status quo. Kelemahan utama dari sistem demokrasi adalah fasifnya rakyat dalam kebijakan, seolah rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum semata. Kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah inilah yang menimbulkan jalan lain perjuangan aspirasi, yaitu jalan ekstra parlementer yang sering mengambil bentuk gerakan massa.

D. Bentuk dan Tahapan Gerakan Massa

Gerakan atau Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Di lihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aksi aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi: 1] Rapat akbar, 2] Rally/long march, 3] Mimbar bebas, 4] Panggung kesenian, dll. Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya aksi massa dipersipkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu dan tuntutan serta institusi yang dituju.

Adapun Tahapan-Tahapan Gerakan Massa

3. Persiapan: Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir dari adanya syarat objektif bahwa isntitusi/lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (*pressure*) massa untuk mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun dimuka pendapat umum (*public* opinion) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan mampu memunculkan:
4. Isu/Tuntutan: Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan.
5. Prakondisi aksi: Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, grafiti action, dst. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi.
6. Aksi: Pelaksanaan aksi massa. Segala tindakan massa di setting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang telah diberi tugas dan sesuai dengan Tupoksi.
7. Evaluasi: Tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan yang kurang sesuai dengan planing.

E. Perangkat Aksi Massa

Perangkat aksi adalah pembagian kerja partisipan aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, antaranya:

1. **Koordinator Umum**. Pemimpin umum dan penanggungjawab umum massa aksi. Kordum berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua panitia aksi harus tunduk pada keputusan kordum saat aksi berjalan.
2. **Koordinator lapangan**. Pemimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi ataupun keputusan kepada peserta aksi/massa. Korlap hendaknya orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.

3. **Wakil koordinator lapangan**. Pembantu korlap di lapangan dan berfungsi sama dengan korlap.
4. **Divisi Acara**. Penyusun acara, bertugas mengatur mengemas jalannya acara termasuk mencatat kronologi aksi.
5. **Orator.** Penyampai tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.
6. **Humas dan Jaringan Aksi**. Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi.
7. **Negosiator**. Berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi dan hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
8. **Mobilisator**. Pemobilisasi massa, menyerukan kepada massa dan kerjanya berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.
9. **Kurir**. Penghubung ketika sebuah aksi massa tidak bisa dipastikan hanya dimanfaatkan oleh satu komite aksi atau kelompok saja. Fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu kurir juga berfungsi menjembatani komi aksi-komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Dalam hal ini kurir bertugas memberikan laporan pada korlap terkait perihal aksi tersebut.
10. **Advokasi**. Bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau massa aksi.
11. **Asisten teritorial/keamanan/sweaper/dinamisator lapangan**. Bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana agar tidak terjadi/Antisipasi tindakan anarkis. Tugasnya mengamati kondisi massa, mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat.
12. **Logistic dan medical rescue**. Bertugas menyediakan perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan p3k terhadap masa yang sakit ketika aksi massa berlangsung.
13. **Dokumentasi**. Bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar/bentuk tulisan kronologi.
14. **Sentral informasi.** Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainya.

F. Pengelolaan Opini dalam Gerakan Massa

Mengelola Opini untuk Menggerakkan Massa merupakan skill penting yang mesti dimiliki setiap orang sebagai sebuah keterampilan memimpin. Generasi muda sebagai mandataris perubahan dimasa depan mesti cakap dalam mengorganisir ide perubahan sebelum dilempar kepada masyarakat. Untuk itu mahasiswa berpotensi menjadi opinion maker dalam menyuarakan perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita terlibat dalam penggalangan dukungan untuk mencapai tujuan. Mulai dari hal yang sederhana sampai masalah yang lebih besar dan strategis. Misalnya, dengan alasan agar cepat sampai sekolah kita berusaha meyakinkan orang tua agar mau dibelikan sepeda. Mulai dari untung dan ruginya memiliki sepeda – coba kita utarakan kepada orang tua kita. Nah, segala usaha dan upaya meyakinkan kedua orang tua itu bias dikatakan gerakan mengelola opini anggota keluarga agar tujuan untuk memiliki sepeda terpenuhi. Jadi menurut saya, pengertian pengelolaan opini bukan sebatas membuat opini lalu dikirim kemedia massa. Tapi penggalangan massa demi tujuan tertentu.

Sedangkan cara dan bentuknya bisa bermacam-macam. Pengelolaan opini sebagai sebuah gerakan setidaknya ada tiga agenda yang mesti kita kerjakan terlebih dahulu. Ketiga agenda itu bisa dijadikan acuan tergantung tingkat kesulitan gerakan yang dibangun.

- Pertama, tentukan tujuan gerakan. Sebelum melontarkan ide atau opini kepada publik secara luas terlebih dahulu tujuan gerakan harus ditetapkan secara tepat. Disini missi gerakan harus menjadi 'panglima' yang akan menjadi menunjuk arah. Namun pengalaman selama ini kenapa gerakan massa 'layu' ditengah jalan,

persoalannya penggerak opini terbuai dengan imbalan-imbalan pragmatis yang ditemui ditengah jalan. Akibatnya ia lupa akan tujuan gerakan.

- Kedua, pegang data dan fakta. Bagi seorang organizer, data adalah senjata yang paling ampuh. Dengan data dan fakta yang lengkap serta akurat kelompok target gerakan akan sulit membantah kebenaran yang kita sampaikan. Apa lagi itu bentuknya penyelewengan atau manipulasi. Ini lah yang banyak dilakukan oleh banyak aktivis dalam menjalankan programnya.
- Ketiga, gali masalahnya. Berbekal data yang akurat dengan sedikit analisa saja kita sudah mengetahui pangkal masalahnya, kemudian dampaknya seperti apa. Bisa menimpa siapa saja dan lain seterusnya. Kalau sudah akar masalah dan dampaknya tergali baru tawarkan solusi penyelesaian dari problem sosial yang terjadi. Analisa yang cerdas, akan menghasilkan jawaban yang cerdas pula.

Ketiga agenda diatas adalah langkah minimal, jika masalah lebih luas dan komplek dibutuhkan strategi- strategi lain yang bisa ditemukan dilapangan. Karena sering kali fakta dilapangan berbicara lain dengan apa yang dipikir ketika dibelakang meja. Di sinilah kemudian beberapa aktivis gerakan memulai gerakan dengan terlebih dahulu memetakan lapangan lengkap dengan kekuatan yang didaerah tersebut.

Dalam mengelola opini menjadi sebuah gerakan, kita bias belajar dari kesuksesan aktivis gerakan dalam mewacanakan Aktivis Busuk (2004), pelanggaran HAM, gerakan anti korupsi dan sebagainya. Kita bisa lihat, berbagai wacana yang disampaikan itu ternyata selalu disuarakan ketika momentum datang. Selain bekerja dengan rencana, mereka juga tidak pernah melewatkan momentum dalam menyuarakan perubahan. Hasilnya mereka terlatih membaca momentum.

Yang tidak kalah penting ketika mengelola opini menjadi gerakan adalah berkongsi dengan media massa. Demi misi gerakan, 'konspirasi' dengan media perlu dibangun.Bukankah media membutuhkan berita yang berasal dari masyarakat. Jika yang disampaikan itu benar dan menyangkut kepentingan publik luas maka tidak ada alasan bagi media untuk memberitakan apa yang ingin kita suarakan. Pada dasarnya semua media membutuhkan orang yang peduli dengan masyarakat. Media juga bias membedakan mana gerakan pura-pura alias bohong. Lalu untuk membangun 'konspirasi' dengan media, bisa dengan mengadakan jumpa pers, seminar, lokakarya, demonstrasi atau menulis opini dan artikel dimedia massa. Cara –cara ini malah sangat efektif mengundang media agar mau memberitakan gerakan yang kita bangun.

Selanjutnya tokoh masyarakat juga perlu dirangkul. Karena bagaimanapun realitas masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dan bergantung kepada tokoh. Selain akan menjadi penggerak utama, mereka bisa dimanfaatkan sebagai 'bemper' jika gerakan mendapatkan pertentangan dari penguasa atau kelompok tertentu yang merasa terusik. Dengan pengaruh yang dia miliki tentunya kelompok penentang akan berpikir sekian kali jika ingin mengganggu. Terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, Bill Drayton, pendiri organisasi Ashoka AS dalam bukunya Mengubah Dunia, Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru yang ditulis oleh David Bornsten mengatakan orang cerdas adalah orang yang tidak puas memberi ikan atau puas mengajari cara memancing. Orang cerdas adalah orang yang terus berjuang tanpa mengenal lelah melakukan perubahan sistemik mengubah sistem industry perikanan demi terciptanya keadilan dan kemakmuran.

Catatan : ....

....

....

MATERI 10

IDEOLOGI BESAR DUNIA

A. Pengertian Ideologi

Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata: *ideos* artinya pemikiran, dan *logis* artinya logika, ilmu, pengetahuan. Dapatlah didefinisikan ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diatara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subyek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti partai politik atau asosiasi politik, kadang hal ini sering disebut subideologi atau bagian dari ideologi. Ideologi juga merupakan *mythos* yang menjadi *political doctrin* (doktrin politik) dan *political formula* (formula politik). Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.6 Ideologi juga memiliki arti: konsepsi manusia mengenai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat atau negara.

B. Dasar dan Akar Kelahiran Ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan *Weltanschauung*), secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Dari segi logika Ideologi adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan.

Pada dasarnya ideologi terumuskan dengan sejumlah kemungkinan:

- *Pertama,* ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa. Ia hadir membawa sekaligus mampu memberikan pengaruh kuat terhadap orang lain secara luas. Ideologi lahir dari pemikiran seseorang.
- *Kedua,* berdasarkan alam pikiran masyarakat, ideologi itu dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan merepresentasikan kelompok masyarakat kemudian disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- *Ketiga,* berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal, ideologi itu lahir dan dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya serta konsekuensi moral dikemudian hari yang akan diterima bila melanggarnya.

Namun demikian, terlepas dengan cara apa dan bagaimana suatu ideologi itu lahir, pada dasarnya ideologi sering disamakan sebagai suatu keyakinan, sebab ia mengandung suatu mitos dan cita-cita yang harus direalisasikan dan memiliki nilai kebenaran. Bagi pengikutnya tidak hanya diakui dan diikuti, lebih dari itu dihayati sebagai sesuatu yang memiliki spirit hidup serta perjuangan dalam menjawab tantangan yang dirasakan.

Semenjak masa kelahiran para pemikir di Yunani, Romawi, Kelahiran kejayaan YudeaKristiani, kemudian Islam dan Abad Pencerahan di Eropa Konstruk Filsafat yang melahirkan ideologi-ideologi besar dunia sesungguhnya berakar dari tiga pendekatan filsafat, yakni:

Pertama, Filsafat Idealisme (*philosophy of idealism*), ini mengedepankan faham rasionalisme dan individualisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi Liberalisme dan Kapitalisme. Ide yang menjadikan kekuatan dasar menempatkan manusia sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*), manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Ini melahirkan faham dalam membangun kehidupan kenegaraan dalam konteks hubungan agama dengan negara adalah terpisah (*separation*) walau dalam hal-hal ceremonial dan ritual agama masih diberikan peran. Pandangan kehidupan yang berdasar ideologi liberalisme-kapitalisme, melahirkan faham Sekulerisme-Moderat17 dalam mengatur kehidupan politik-kenegaraan.

Kedua, Filsafat Materialisme (*philosophy of materialism*), ini mengedepankan faham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi Sosialisme-Komunisme. Materi (ekonomi), yang menjadi kekuatan dasar menempatkan kondisi ekonomi sebagai faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Ini melahirkan faham dalam membangun kehidupan kenegaraan dalam konteks hubungan agama dengan negara adalah dipertentangkan (*conflic*). Agama dianggap sebagai faktor penghambat, candu bagi masyarakat, karena itu tidak diberikan peran sama sekali. Pandangan kehidupan yang berdasar ideologi SosialismeKomunisme melahirkan faham Sekularisme-Radikal18 dalam mengatur kehidupan politikkenegaraan.

Ketiga, Filsafat Teologisme (*philosophy of teologism*). Dalam faham ini masih dibagi menjadi dua: 1] faham agama yang menempatkan ajaran Tuhan memegang peran sentral dalam kehidupan politik-kenegaraan, tetapi dalam konstruk politiknya, menjadikan pemuka agama sebagai tokoh yang dikultuskan. 2] faham agama yang memang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan ekspresi. Ini menempatkan ajaran Tuhan sebagai faktor integratif dan pencerahan. Dalam hubungannya dalam kehidupan politikkenegaraan, agama sebagai suatu yang suci kekuatannya bukan di pengkultusan dan pemistikan melainkan agama sebagai pembimbing (*guidens*). Agama dapat didialogkan untuk terlibat sebagai wacana sekaligus sumber etika, moral dan hukum, maka dalam kehidupan politik-kenegaraan itu dapat dikatakan agama bersifat dinamis, dapat disebut pula sebagai filsafat teologisme-dinamis.

C. Fungsi dan Faktor Pendukung Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem keyakinan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat menyeluruh yang mendalam mengenai segala segi kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Ideologi mengandung kehendak dan cita-cita tentang suatu kehidupan masyarakat yang ideal yang diyakini kebenarannya dan harus diperjuangkan agar terwujud dengan kongkrit. Oleh karena itu ideologi merupakan panduan bagi penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan secara praktis dan strategis untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ideologi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

6. Fungsi *Etis*, sebagai panduan&sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan&kebangsaan.
7. Fungsi *Integrasi*, nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
8. Fungsi *Kritis*, sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
9. Fungsi *Praxis*, ebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit.
10. Fungsi *Justifikasi*, sebagai nilai pembenar atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.

Menurut tokoh psyco-analisis Foucault, ideologi menyangkut empat faktor atau hal penting: 1] Ekonomi sebagai basis, 2] Kelas yang berkuasa, 3] Kekuatan repressif, 4] Sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran sejati. Menurut

Gianfranco, seorang pakar sosiologi ada tiga kekuatan sosial yang mempengaruhi masyarakat: 1] Kekuatan politik, 2] Kekuatan ekonomi, 3] Kekuatan normatif atau ideologi.

D. Ideologi Besar Dunia

1. Kapitalisme

Sosok Adam Smith dengan buku termasyhurnya, *The Wealth of Nations,* yang disebut sebagai Bapak Kapitalisme menyebutkan kapitalisme yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: "Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands)* mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah *"a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned".* (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat) Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (*primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme*).

2. Sosialisme

Sosialisme adalah sebuah masyarakat dimana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratik; dan semua ini secara internasional. Istilah "sosialisme" atau "sosialis" dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan: ideologi atau kelompok ideology, sistem ekonomi, negara. Kata ini mulai digunakan paling tidak sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, pertama digunakan untuk mengacu kepada pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, digunakan untuk mengacu pada pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 dan kemudian oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopedie nouvelle*.

Sosialisme sebagai ideologi menurut penganut Marxisme (terutama Friedrich Engels), model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia, sebagai sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa Pencerahan di abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau, Diderot, abbe de Mably, dan Morelly mengekspresikan ketidakpuasan berbagai lapisan masyarakat di Perancis. Kemudian Sistem Ekonomi dalam sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Marx tentang penghapuskan kepimilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditi penting dan kepentingan masyarakat banyak, Seperti Air, Listrik, dll.

3. Komunisme

Komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1830 di Peracis. Suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskannya raja. Istilah komunis, awalnya mengandung dua pengertian. *Pertama,* ada hubungannya dengan komune (*commune*) suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasian *komune-komune* itu. *Kedua,* ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Pada esensinya adalah sebuah ala berfikir berlandaskan kepada *atheisme,* yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas faktor ekonomi. Karl Marx dan Frederich Engels adalah tokoh utamanya dalam mengembangkan faham ini. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme.

Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut *"Marxisme-Leninisme".* Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai *think-tank*. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.

4. Fasisme

Fasisme ditinjau dari akar-akar pemikirannya tergolong unik. Ia, seperti dikatakan Hayes merupakan percampuran berbagai teori yang paling radikal, reaksioner dan mencakup berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofis. Akar-akar fasisme bisa dilacak dalam pemikiran Plato, Aristoteles, Hegel, Rosenberg, Doriot, Farinasi, Gobinau, Sorel, Darwin, Nietzsche, Marinetti, Oswald, Spengler, Chamberlain dan lain-lain.68 Jadi fasisme, memiliki akar-akar intelektual dan filosofis ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam bentuknya yang modern dan kontemporer, dan dalam formatnya yang *par exellence* terjadi ketika Borneo Mussolini menguasai Italia (1922), Hitler dengan Nazinya mendominasi Jerman (1933) Franco berkuasa di Spanyol (1936), Tenno Heika memerintah Jepang (1930-an) dan Amerika Latin dimasa pemerintahan Juan Peron (1950-an).

Mussolini dan Hitler merupakan tokoh fasisme yang fenomenal. Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, *fascio*, sendirinya dari bahasa Latin, *fascis*, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme

berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.

5. Anarkisme

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Atau, dalam tulisan Bakunin yang terkenal: "kebebasan tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan."

6. Anarkisme-Marxisme

Komunisme anarkis dan marxisme adalah dua filsafat politik yang berbeda, terdapat beberapa kemiripan antara metodologi dan ideologi yang dikembangkan oleh beberapa anarkis dan Marxis, bahkan sejarah keduanya juga saling beririsan. Keduanya berbagi tujuan-tujuan jangka panjang yang serupa (komunisme tanpa negara), musuh politik yang sama (konservatif dan elemen-elemen sayap kanan), melawan target-target struktural yang sama (kapitalisme dan pemerintahan yang eksis saat ini). Banyak Marxis telah turut berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam revolusi-revolusi anarkis, dan banyak anarkis yang juga berlaku demikian dalam revolusi-revolusi Marxis. Tetapi bagaimanapun juga, anarkisme dan Marxisme tetap menyimpan saling ketidaksetujuan yang kuat atas beberapa isu, termasuk di dalamnya peran alamiah negara, struktur kelas dalam masyarakat dan metoda materialisme historis. Dan selain bentuk kerjasama, terjadi juga konflik-konflik berdarah antara para anarkis dan Marxis, seperti yang terjadi dalam represi-represi yang dijalankan oleh para pendukung Uni Soviet melawan para anarkis.

7. Konservatisme

Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, conservare, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbedabeda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai â€œbertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan. Roger Scruton menyebutnya sebagai pelestarian ekologi sosial dan politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial.

Catatan : ....

....

....

....

....

MATERI 11

STUDI ADVOKASI & PENDAMPINGAN MASYARAKAT

A. Prawacana

Dalam konsep developmentalisme yang dikembangkan di negara-negara berkembang-kasus Indonesia misalnya-telah berhasil menciptakan berbagai kemajuan yang bersifat material. Pembangunan memang menjadi 'kata kunci' bagi keinginan untuk 'mengejar ketertinggalan' dengan negara lain atau dengan daerah lain. Karenanya, di setiap daerah yang 'dibangun' akan terlahir berbagai bentuk akitivitas-aktivitas yang diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.

Dalam konteks ini, untuk mempercepat implementasi tersebut dalam berbagai bidang; maka negara akan melahirkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Kebijakan (publik) menjadi penting dalam logika negara agar setiap aktivitas pembangunan memperoleh legitimasi yuridis formal; dan (tragisnya) dapat bersembunyi ketika implementasi pembangunan harus bersentuhan (dan memunculkan problem konflik) dengan kepentingan lain. Misalnya, pembangunan jalan yang melahirkan penggusuran atau ganti rugi yang tidak adil, penggusuran Pedagang Kaki Lima karena alasan penertiban kota, siswa DO karena alasan tidak sanggup membayar sejumlah biaya, dan sebagainya.

Kebijakan dalam logika negara adalah untuk kepentingan publik, makanya diberikanlah istilah kebijakan publik. Perspektif negara dalam konteks kebijakan publik ini akhirnya memberikan implikasi logis untuk memposisikan rakyat pada posisi objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Menjadi wajar jika kemudian paradigma demikian (rentan) melahirkan realitas paradoks dalam pembangunan; untuk mensejahterakan rakyat atau justru sebaliknya. Karena ternyata dalam berbagai kasus, ada banyak kebijakan (publik) pembangunan justru melahirkan situasi kontraproduktif.

Kasus-kasus konflik yang melibatkan negara di satu sisi dan melibatkan rakyat di sisi lain terkait dengan lahirnya sejumlah kebijakan merupakan faka yang tidak dapat ditutup-tutupi. Ada banyak kebijakan yang akhirnya (dianggap) tidak berpihak pada kepentingan publik, kecuali kepentingan ekonomi-politik negara atau kekuasaan. Fakta bahwa dalam setiap konflik antara negara (baca: kekuasaan) dengan rakyat ternyata tidak pernah menguntungkan rakyat, karena hampir tidak pernah ada konflik antara keduanya dimenangkan oleh rakyat. Tatkala rakyat dirugikan dalam berbagai kebijakan tersebut, maka lahirlah sejumlah kegiatan untuk memberikan pendampingan bagi rakyat atau siapa saja yang mendapatkan perlakuan 'tidak adil' tersebut. Pendampingan-pendampingan tersebut, baik yang dilakukan oleh Lembaga bantuan Hukum, LSM atau lembaga-lembaga yang konsen dengan perjuangan keadilan sosial, merupakan suatu bentuk advokasi.

B. Pengertian Advokasi

- ✓ Advocate dalam bahasa Inggris dapat berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.
- ✓ Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*).
- ✓ Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.
- ✓ Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para

pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka system yang ada. Yang menjadi pusat pijakan advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, accountability, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, *Pertama Advokasi Litigasi. Kedua, Advokasi Nonlitigasi.* Yang dimaksud dengan advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti class-action, judicial review, dan legal standing. Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demonstrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya

C. Kebijakan yang Berlaku di Masyarakat

Sesungguhnya masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat merupakan dampak dari hubungan dan tarik-menarik kepentingan antara tiga aktor/pelaku governance, yakni negara, swasta dan masyarakat. Ketika hubungan itu berjalan tidak seimbang, biasanya terjadi karena ada persekongkolan antara negara dan swasta, maka dapat dipastikan akan lahir kebijakan-kebijakan korup yang sangat merugikan masyarakat. Ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri meliputi peraturan (rules), regulasi, standarisasi, Undang-Undang, pernyataan dan Instruksi (Decree) yang memiliki fungsi sebagai norma umum, standar etika maupun sanksi.

Kemudian muncul istilah advokasi dengan tujuan keadilan sosial adalah bagaimana mengupayakan/mendorong lahirnya sebuah kebijakan publik yang adil, bagaimana merubah kebijakan publik yang tidak adil dan bagaimana mempertahankan kebijakan yang sudah adil dengan suatu strategi. Sebuah kebijakan publik tidak akan pernah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Walaupun dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat wakil rakyat, tapi hal itu tidak akan pernah menjamin bahwa kepentingan rakyat akan menjadi prioritas. Hal ini karena aktor perumus dan pembuat kebijakan memiliki logika kekuasaan dan kepentingan sendiri untuk beroperasi. Apalagi jika ruang publik dalam kehidupan politik tidak mendapatkan jaminan dalam sistem dan konstitusi.

Agar kebijakan publik tidak menjadi alat yang justru meminggirkan kepentingan publik, karena digunakan sebagai alat kekuasaan sebuah bangsa untuk melakukan/melegitimasi perbuatan-perbuatan korup dan manipulatif bagi kepentingan segelintir orang, kebijakan publik harus selalu bersinggungan dengan konsep demokrasi. Artinya kebijakan publik tidak sekedar disusun atau dirancang oleh para pakar dan elit penguasa yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak, melainkan harus menoleh pada opini publik yang beredar. Demokratis atau tidaknya perumusan kebijakan publik yang telah dilakukan akan sangat tergantung dari luas atau tidaknya ruang publik sendiri. Oleh karenanya, perluasan ruang publik dengan melakukan reformasi konstitusional yang mengarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar dalam proses politik yang ada pada sebuah negara harus dilakukan.

D. Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Pergerakan

Mengingat advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, maka menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik itu. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat sebuah kebijakan itu sebagai suatu sistem hukum.

Secara teoritis, sistem hukum mengacu pada tiga hal:

1. Isi hukum (content of law) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau karena adanya 'kesepakatan umum' (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.
2. Tata laksana hukum (structure of law) yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).
3. Budaya hukum (content of law) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas, isi dan tata-laksana hukum.

Karenanya, suatu kegiatan atau program advokasi yang ideal itu harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. Dengan demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan.

Untuk melakukan advokasi pada tiga aspek hukum diatas, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda mengingat ketiga aspek hukum tersebut dihasilkan oleh proses-proses yang memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, menurut Roem, kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang disesuaikan sebagai berikut:

1. Proses-proses legislasi dan juridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.
2. Proses-proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
3. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.

Melihat bahwasannya Advokasi merupakan pekerjaan yang memiliki skala cukup besar (karena sasaran perubahan ada tiga aspek), maka satu hal yang sangat menentukan keberhasilan advokasi adalah pada strategi membentuk jaringan kerja advokasi atau jaringan kerja organisasi. Pasalnya kegiatan advokasi adalah pekerjaan multidimensi, sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda dalam satu koordinasi yang sistematis dan terpadu. Sebagai catatan, tidak ada satu organisasipun yang dapat melakukan sendiri kegiatan advokasi tanpa ada jaringan atau dukungan dari kelompok lainnya. Justru semakin besar keterlibatan berbagai pihak, akan semakin kuat tekanan yang dapat diberikan dan semakin mudah kegiatan advokasi dilakukan.

Untuk membentuk jaringan organisasi advokasi yang kuat, dibutuhkan bentuk-bentuk jaringan yang memadai. Sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk jaringan organisasi advokasi yang satu sama lainnya memiliki fungsi dan peranan advokasi yang berbeda, namun berada pada garis koordinasi dan target yang sama:

1. Jaringan kerja garis depan (front lines) yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi juru bicara organisasi, melakukan lobi, melibatkan diri dalam aksi yuridis dan legislasi serta penggalangan

lingkar sekutu (aliansi). Tentunya pihak-pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan advokasi jaringan kerja garis depan setidaknya harus memiliki teknik dan ketrampilan untuk melakukan tugas dan fungsi jaringan ini.

2. Jaringan kerja basis yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian, membangun basis massa, pendidikan politik kader, mobilisasi aksi dan membentuk lingkar inti.
3. Jaringan kerja pendukung yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung kerja-kerja advokasi dengan cara mengupayakan dukungan logistic, dana, informasi, data dan akses.

Berhasil atau tidaknya advokasi yang kita lakukan sangat tergantung dari penyusunan strategi yang kita buat. Oleh karena itu dalam menyusun strategi advokasi harus mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan advokasi. Aspek-aspek itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.
2. Kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.
3. Realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan public. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.
4. Batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.
5. Dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi
6. Analisa ancaman dan peluang.

E. Strategi dan Kaidah Advokasi

Sebagai kegiatan yang terencana dan sistematis, maka ada beberapa kaidah yang menjadi pegangan bagi tiap orang yang melakukan advokasi. Strategi awal yang harus dilakukan adalah :

1. **Membentuk lingkar inti:** Langkah pertama dari proses advokasi adalah memebentuk lingkar inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedemikian pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang diadvokasi.
2. **Memilih issu strategis:** Tugas pertama dari lingkar inti adalah merumuskan issu tertentu yang diadvokasi. Issu yang dirumuskan tersebut dapat dikatakan menjadi suatu issu strategis jika: Aktual, Penting dan mendesak, Sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Berdampak positif pada perubahan sosial yang lebih baik, Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar.
3. **Merancang sasaran dan strategi:** Dalam merancang sasaran dan strategi dapat digunakan metode SMART, yaitu: *Spesifik*; dalam arti rumusan sasaran memang spesifik, kongkrit, dan jelas. *Measurable*; dalam arti hasilnya punya indikator yang jelas sehingga Bisa disajikan oleh orang lain dapat dipantau dan diketahui. *Realistis*; dalam arti apakah sasaran mungkin dapat dicapai. *Time Bound*; dalam arti punya batas waktu yang jelas.

4. **Mengolah data dan mengemas informasi:** Salah satu cara yang dikenal dalam mengolah data dalam proses advokasi adalah dengan melakukan riset advokasi. Riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian kebijakan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya sebagai informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan issu strategis, sebagai bahan proses legislasi, untuk keperluan lobby dan kampanye, dan sebagainya

   Sedangkan Kaidah-kaidah dalam Advokasi sebagaimana:
   1. Mencermati posisi kasus; digunakan untuk memetakan persoalan yang berisikan identifikasi masalah, potensi dan peluang serta jangka waktu yang dikerjakan.
   2. Identifikasi siapa kawan dan siapa lawan; dilakukan untuk memperkecil lawan dan memperbanyak kawan, melalui identifikasi siapa saja yang mendukung dan siapa saja yang menentang.
   3. Kerjakan rencana yang sudah dibuat; agar tidak secara tibga-tiba mengubah sasarab dan target yang sudah disepakati dan disusun.
   4. Tetap konsisten pada masalah
   5. Jangan mudah ditakuti atau diintimidasi
   6. Berimajinasilah
   7. Berdoalah

F. Implementasi Advokasi

1. Advokasi yang digunakan untuk menuntut perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang yang biasa dinamakan dengan langkah legislasi. Misalnya, counter draf (pengajuan konsep-konsep tanding), judicial review (hak uji materiil) atau langkah-langkah ligitasi dengan menguji di pengadilan lewat satu kasus.
2. Penggunaan lobi, strategi negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Hal ini memerlukan jaringan yang kuat dan luas. Paling tidak ada 3 kekuatan yang menjadi basis dukungan, pertama, kerja pendukung yang menyediakan dukungan dana, logistik informasi dan akses, kedua, kerja basis menjadi dapur gerakan dalam membangun basis masa, lewat pendidikan kader atau membentuk lingkar inti dan melakukan mobilisasi aksi, dan ketiga, kerja garis depan yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara, perunding, pelobi, dan terlibat dalam upaya penggalangan dukungan.
3. Melakukan kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, peroganisasian basis dan pendidikan politik. Melalui pemanfaatan jaringan yang ada, pertama, lingkaran inti yaitu mereka yang tergolong sebagai penggagas, pemrakarsa pendiri, penggerak utama sekaligus pengendali arah kebijakan, tema atau isu dari sasaran advokasi. Biasanya kelompok inti adalah mereka yang mempunyai kesamaan ideologi. Kedua, adalah jaringan sekutu, yang melakukan kerja-kerja aksis, biasanya terdiri dari mereka yang mempunyai kesamaan kepentingan.

Catatan : ....

....

....

....

....

MATERI 12

TEKNIK LOBY & MEMBANGUN JARINGAN

A. Teknik Loby atau Negosiasi

Seringkali orang awam akan menangkap kesan bahwa negosiasi merupakan istilah lain untuk mengatakan "keterlibatan dalam konflik." Namun menurut Oxford Dictionary negosiasi didefinisikan sebagai: "pembicaran dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan, untuk mengatur atau mengemukakan." Istilah-istilah lain kerap digunakan pada proses ini seperti: pertawaran, tawar-menawar, perundingan, perantaraan atau barter.

Dengan kata lain negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingankepentingan tersebut harus dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Negosiasi adalah pertemuan antara du pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang :

1. Penting dalam pandangan kedua belah pihak
2. Dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak
3. Membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya.

Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang; dalam setiap negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Berdasarkan uraian singkat di atas, bisa dikatakan bahwa negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

1. Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi/perusahaan, sendiri/kelompok;
2. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu–baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);
3. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;
4. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.
5. Hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah;
6. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;

Walau mengandung konflik, lobby atau negosiasi sejatinya merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan kemampuan lobby dan negosiasi, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa harus melakukan cara-cara ekstrim, seperti perang, pemaksaan, atau perebutan. Secara umum, suatu proses lobby atau negosiasi akan menghasilkan 4 kemungkinan:

1. **Kuadran Kalah-kalah (Menghindari konflik).** Kuadran ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan
2. **Kuadran Menang-kalah (Persaingan).** Memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita dan biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri

dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadi suasana persaingan di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.

3. **Kuadran Kalah-menang (Mengakomodasi).** Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah– mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.
4. **Menang-menang (Kolaborasi).** Disebut dengan gaya manajemen kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.

B. Pengembangan Strategi Negosiasi

Negosiator yang berhasil memiliki sikap yang positif ialah mereka yang dapat memandang konflik sebagai sesuatu yang normal dan konstruktif. Ketrampilan yang mereka gunakan untuk memecahkan konflik bukanlah "sulap". Ketrampilan tsb dapat dipelajari. Sikap kita selalu penting, dan ini terutama berlaku dalam bernegosiasi. SIKAP mempengaruhi sasaran kita, dan sasaran mengendalikan cara orang bernegosiasi. Cara kita bernegosiasi menentukan hasilnya.

Masing-masing pihak di dalam suatu negosiasi tentu ingin menang. Negosiasi yang berhasil berakhir dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Setiap kali seorang negosiator mengancangi suatu situasi pertawaran dengan gagasan, "Saya harus menang, dan benar-benar tidak peduli tentang pihak lawan", maka bencana pun sudah diambang pintu. Konsep negosiasi samasama menang tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan etika. Pihak yang mengakhiri suatu negosiasi dengan perasaan bahwa ia telah tertipu mungkin berusaha membalas dendam belakangan.

Negosiasi sama-sama menang secara sederhana adalah "kerjasama yang baik". Ketika pihakpihak yang berkepentingan di dalam suatu perjanjian merasa puas dengan hasilnya, mereka akan berusaha membuat perjanjian itu berhasil, tidak sebaliknya. Mereka pun akan bersedia untuk bekerja sama satu sama lain pada masa datang. Barangkali anda bertanya, "Bagaimana saya bisa menang di dalam suatu negosiasi bila saya membolehkan pihak

lawan juga memenuhi kebutuhan mereka?". Jawaban pertanyaan ini terletak pada kenyataan bahwa orang yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Bagi sebagian orang, kata kompromi mempunyai maknayang negatif. Bagi yang lain, kata ini menggambarkan prinsip beri/ terima yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu secara gratis—tampaknya selalu ada harga atau konsesi yang harus dibuat untuk menerima apa yang anda inginkan. Kata kompromi secara sederhana berarti membuat dan/ atau menerima konsesi [kelonggaran]. Keberhasilan negosiasi pada intinya dapat ditingkatkan dengan sudut pandang pendekatan yang tepat. Bagian-bagian berikut memberikan tuntunan yang memadai di bawah sub-sub judul:

1. Pokok Masalah yang di Negosiasikan

Waspadai adanya beberapa konteks dimana negosiasi tidak tepat untuk diadakan:

a) Menegosiasikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak tertentu dengan aturan yang tegas.
b) Menegosiasikan pokok yang mengabaikan peraturan mengenai diskriminasi ras, jenis kelamin, atau lainnya.
c) Menegosiasikan prosedur dan tata-tertib kebijakan tertentu.
d) Menegosiasikan keputusan pihak terkait yang telah diumumkan.
e) Mengadakan negosiasi ketika semua pihak tidak hadir.

2. Persiapan Negosiasi

Setelah memastikan persoalan yang dapat Anda negosiasikan, maka selanjutnya adalah menentukkan apa yang Anda ingin capai, dan dengan siapa, pada setiap tahap negosiasi. Kenalilah tujuan-tujuan Anda, faktor-faktor yang sangat penting, dan hal-hal yang dapat Anda relakan dalam kondisi tertentu. Hanya setelah Anda menentukkan sasaran Anda, maka dapat dimulai mempersiapkan negosiasi. Dengan waktu yang Anda miliki, usahakanlah untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang pihak lain :

a) Apakah dia independen atau bagian dari suatu tim?
b) Apakah dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan tanpa harus mengadakan rujukan balik?
c) Jenis orang seperti apakah dia?
d) Bagaimana tingkat pengalamannya sebagai seorang negosiator?
e) Jenis pendekatan apa yang mungkin digunakan untuk mencapai hasil terbaik?
f) Apakah kepentingan-kepentingannya, dan dengan urutan prioritas yang bagaimana?
g) Perilaku seperti apa yang dapat Anda harapkan dari orang tersebut?

3. Mencapai Suasana yang Tepat

Suasana diciptakan dalam waktu yang sangat singkat : beberapa detik atau menit. Suasana dipengaruhi oleh hubungan antara pihak-pihak pada waktu lampau, harapan mereka saat ini, sikap persepsi, dan keahlian yang mereka miliki dalam bernegosiasi. Suasana dipengaruhi oleh konteksi pertemuan, lokasi, penataan tempat duduk, tingkat formalitas, penataan 'domestik'. Pada periode ice-breaking, Anda hendaknya berupaya untuk menciptakan suasana yang hangat, bersahabat, penuh kerja sama, dan praktis. Komunikasi verbal maupun non verbal [spt kontak mata] yang bersahabat dapat membantu menciptakan kondisi yang membuat orang-orang termotivasi untuk bekerja sama.

4. Taktik-Taktik Negosiasi

Negosiator yang berpengalaman akan mencari kerjasama dalam topik-topik yang netral; negosiator yang mencari kekuasaan, akan berusaha untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda, serta prioritas dan perhatian Anda.

Setelah menentukan tujuan-tujuan Anda, strategi dan kekuatan relatif tawar menawar Anda, pendekatan apa yang Anda ingin gunakan dalam proses negosiasi? Taktik-taktik apa yang akan Anda gunakan?

a) Apakah Anda membuka dengan mengajukan permintaan-permintaan Anda terlebih dahulu atau belakangan?
b) Rencana cadangan apa yang Anda miliki untuk menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan? Menghentikan negosiasi? Kembali pada unsur pokok untuk mendapatkan tuntunan? Menyetujui, tetapi kemudian tidak menepati kesepakatan tersebut? Apakah konsekuensi dari setiap tindakan ini dalam jangka pendek/ dalam jangka panjang, dalam kaitan dengan kredibilitas Anda dan kekuatan tawar menawar pihak lain?
c) Apakah yang Anda ketahui mengenai individu-individu dalam tim lain? Kekuatan dan kelemahan mereka? Kepribadian mereka? Apakah mereka memilih gaya tertentu yang dapat Anda serang?
d) Bagaimana kemahiran mereka dalam menggertak? Bagaimana dengan kemahiran Anda sendiri? Apakah gertakan merupakan taktik yang bermanfaat dalam situasi tertentu?
e) Apakah Anda yakin dapat membedakan antara fakta, opini, asumsi, dan rumor? Akankah pihak lain menerima fakta-fakta yang Anda miliki?
f) Pada tahap apa sebaiknya Anda memberikan informasi? atau menahannya?
g) Apakah Anda memiliki kemampuan teknis/ know how dalam menegosiasikan pokok-pokok persoalan secara efektif? di mana Anda dapat memperoleh dukungan dalam bidang tersebut, jika perlu?
h) Apakah Anda memiliki kemampuan sosial dalam mengelola hubungan Anda dengan pihak lain?
i) Dst.

5. Gaya-gaya Negosiasi

Dalam gaya negosiasi dapat dijelaskan dalam dua dimensi, yaitu arah dan kekuatan.

a) Arah berbicara tentang cara kita menangani informasi.
   - Mendorong [push] : memberi informasi, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, mengkritik, bertindak sebagai pengganggu—semua taktik yang berlaku tergantung sifat dan konteks negosiasi.
   - Menarik [pull] : mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan kita.
b) Kekuatan berbicara tentang keluwesan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula.
   - Bersikap keras: kita ingin menang berapapun harganya, tidak akan mengalah atau mundur, tidak akan menerima tawaran apapun. Kita mengejar sasaran yang tinggi
   - Bersikap lunak: kita mengalah, ragu-ragu, sulit untuk berkata tidak, menyesuaikan diri— sasaran yang kita kejar rendah. Kita dapat mengambil sikap keras dalam beberapa persoalan dan bersikap lunak dalam persoalan-persoalan yang lain: hal ini memberikan petunjuk jelas mengenai hasil yang menjadi prioritas.

6. Mengakhiri Negosiasi

Untuk memantau perkembangan negosiasi, hal-hal berikut perlu diperhatikan:

a) Apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang telah disepakati?
b) Apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan tsb?
c) Apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas pokok-pokok yang kecil [atau yang besar? kapan?
d) Bagaimana perasaan kedua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat? Apakah dirasa adil?
e) Apakah kita puas? Apakah justru kita saling mengecam? Saling mempertahankan pendirian ? kecewa?

C. Teknik Membangun Jaringan

Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah misi dalam membangun jaringan yang ingin diratakan itu memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai spesifikasi yang berbeda dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu mencapi tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang juga mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama. Semakin banyak warga masyarakat /organisasi menyuarakan hal yang sama, maka semakin kuat kepercayaan bagi timbulnya perubahan yang diinginkan. Hal ini secara sederhana disebut sebagai kebutuhan untuk membangun jaringan.

Secara garis besarnya kerja-kerja jaringan dapat dipilah menjadi tiga bentuk:

1. *Kerja Basis :* Kerja basis merupakan kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (pengorganisir) dengan melakukan langkah-langkah; membangun basis masa, pendidikan dan perumusan strategi.
2. *Kerja Pendukung* : Kerja pendukung ini dilakukan oleh kelompok-kelompok sekutu yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi data dan akses. Kelompok sekutu bisa berasal dari kalangan LSM, kelompok intelektual/akademisi, Lembaga pendana (donor) dan kelompokkelompok masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap persoalan yang diperjuangkan.
3. *Kerja Garis Depan* : Kerja garis depan dilakukan terutama berkaitan dengan advokasi kebijakan, mobilisasi massa, mempeluas jaringan sekutu, lobbi dan melaksanakan fungsi juru runding. Kerjakerja garis depan bisa dilakukan oleh kelompok organisasi/invidual yang memiliki keahlian & ketrampilan tentang hal ini.

Dengan pembagian tugas maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari individu dan kelompok yang bersedia membantu warga dalam melakukan perubahan sosial, baik melalui strategi advokasi, maupun penguatan komunitas basis. Akhirnya, pembangunan jaringan merupakan salah satu cara untuk menambah “kawan”, sekaligus mengurangi “lawan” dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

MATERI 13

MANAJEMEN AKSI

A. PENGERTIAN MANAJEMEN AKSI

Secara umum Manajemen memiliki pengertian pengelola potensi atau isi di dalam sebuah wadah atau komunitas. Sedangkan aksi berasal dari kata Action yang bermakna Gerak, Gerakan adalah berpindahnya energi, volume, tempat dan waktu dari kondisi semula menuju kondisi kemudian. Aksi di dalam dunia organisasi pergerakan dapat diterjemahkan sebagai segala pikiran dan perbuatan/tindakan yang mengarah pada capaian-capaian terhadaptujuan perjuangan itu sendiri.Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen aksi merupakan suatu carayang digunakan untuk mengatur suatu massa aksi agar tetap terkoordinir dansesuai dengan rencana dan target awal hingga mencapai hasil yang diinginkan. Aksi umumnya dilatar belakangi oleh matinya jalur penyampaianaspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil jalan pintas' dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik.

Dengan demikian isu yangdigulirkan harapannya dapat menjadi snowball. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara yang dilegalkan, oleh karenaitu lembaga pendidikan seperti universitas juga harus berperan sebagai guardianof value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi? karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi ketersampaian pesankepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Sehinggaaksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan.

B. ATURAN HUKUM

Undang-undang NO. 9 TAHUN 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa hal; penting dalam undang-undang ini :

- Penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilaksanakanditempat tertentu, antara lain Istana Presiden (Radius 100m), tempatibadah (Radius 150 m), Instalasi militer dan obyek vital nasional(Radius 500 m) dari pagar luar.
- Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatanumum (Sajam, Molotov, dll)
- Menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihakkepolisian setempat
- Surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktudan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi dimana dalamUU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab.

C. BENTUK DAN SUSUNAN MASSA AKSI

Bentuk Aksi seperti Aksi Demonstrasi, Aksi Mogok makan, Aksi Damai,Aksi Mimbar bebas, Aksi Theatrikal, dll.

D. TAHAPAN AKSI

Dalam melaksanakan aksi, harus mempertimbangkan beberapa hal penting. baik perangkat yang mesti dipersiapkan ma upun tahapan-tahapan yang harusdilalui bersama. Aksi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, antar lain:

1. Pra Aksi

a. Persiapan dan pematangan issue-issue

b. Menyusun Tim Aksi
c. Perangkat aksi : adalah bagian kerja partisipan massa aksi. Perangkat massaaksi disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:
   1) Koordinator lapangan: Korlap bertugas memimpin aksi dilapangan, berhak memberikan instruksi kepada pe serta aksi/massa. Keputusanuntuk memulai ataupun membubarkan /mengakhiri massa aksiditentukan oleh korlap.
   2) Orator: Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan massa aksi dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yangmembakar semangat massa.
   3) Humas: Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal massa aksi kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
   4) Negosiator: Negosiator berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara targettersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, makanegosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasiagar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiatorhendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
   5) Kurir (menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan massaaksi lain)
   6) Advokasi (memberi perlindungan hukum)
   7) Asisten teritorial/keamanan/sweaper/dinamisator lapangan/ intelejen
   8) Logistic dan medical rescue.
   9) Dokumentasi
   10) Tim kreatif
   11) Membuat press release (Berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah dibahas)
   12) Mengumpulkan massa (estimasi)
   13) Menghubungi media
   14) Mempersiapkan perangkat / kelengkapan aksi (spanduk, bendera, press release, perangkat dokumentasi, poster, pengeras suara seperti TOA dan mobil sound system, dan identitas peserta aksi, dan fasilitas theatrical)
   15) Skenario dan pembagian peran
   16) Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan

2. Aksi

Dalam tahapan inilah peran, fungsi dari perangkat aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing, komunikasi serta koordinasi antar perangkat aksi tidak boleh terputus karena perubahan situasi di lapangan sangatlah cepat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu aksi dapat dihindari, misalnya : Provokasi, Infiltran, Represif aparat, Chaos. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aksi yakni :

1. Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet.
2. Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas.
3. Yel-yel dan menyanyikan lagu. Sebagai penyemangat massa aksi dan mendominasi / menguasai suasana / keadaan (situasi dan kondisi).
4. Audiensi ke pihak yang dituju, dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk, negosiator maupun yang jago dalam beraudiensi.

5. Pembacaan press release. Hal ini biasanya dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media agar pesan yang kita bawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas.

3. **Pasca Aksi**
   - Absensi, sebagai pemastian terhadap jumlah peserta aksi yang terlibat selama pelaksanan aksi.
   - Evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi
   - Rekomendasi, dari hasil-hasil yang telah dicapai melalui aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Peranan kelembagaan organisasi di lingkungan yang dihadapi menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Pikiran tanpa praktek hanya akan melahirkan mimpi saja, sedangkan praktek tindakan tanpa pikiran hanya akan melahirkan ugal-ugalan atau anarki gerakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa gerakan harus Massa Aksi (Massa yang sadar akan pikiran dan perbuatannya) bukan Aksi Massa (Aksi yang gemerlap tampilannya saja atau hanya ikut-ikutan). Program perjuangan organisasi pergerakan yang dipraktekkan dalam Manajemen Aksi dan Propaganda harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Catatan : ....

....

....

....

....

....

LAGU-LAGU PERJUANGAN

MARS PMII

-Inilah kami wahai Indonesia
Satu barisan dan satu jiwa
Pembela bangsa penegak agama
Tangan terkempal dan maju kemuka
-Habislah sudah masa yang suram
Selesai sudah derita yang lama
Bangsa yang jaya Islam yang benar
Bangun serentak dari bumiku subur
-Dengan mu PMII pergerakanku
Ilmu yang bakti ku berikan
Adil dan makmur kuperjuangkan
Untukmu satu tanah airku
Untukmu satu keyakinanku
-Inilah kami wahai Indonesia
Satu angkatan dan satu jiwa
Putera bangsa bebas merdeka
Tangan terkempal dan maju terkemuka

BEJUANGLAH PMII

-Berjuanglah PMII berjuang
Marilah kita bina persatuan
Berjuanglah PMII berjuang
Marilah kita bina persatuan
Hancur leburkanlah angkara murka
Perkokohlah barisan kita, Siap....
-Sinar api Islam kini menyala
Tekad bulat jihad kita membara
Berjuang PMII berjuang
Menegakan kalimat tuhan 2x

TOTALITAS MAHASISWA

-Kepada para mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Dipersimpangan jalan
-Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Di lembah sejarah manusia
-Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun kejalan
Demi mempersembahkan jiwa & raga
Untuk negeri tercinta 2x

HIMNE PMII

-Bersemilah-bersemilah Tunas PMII
Tumbuh subur-tumbuh subur kader PMII
Masa depan kita tempuh
untuk meneruskan perjuangan
Bersemilah-bersemilah
kau pahlawan bangsa
-Bersemilah-bersemilah Tunas PMII
Tumbuh subur-tumbuh subur kader PMII
Masa depan kita tempuh
untuk meneruskan perjuangan
Bersemilah-bersemilah
kau harapan bangsa

DARAH JUANG

-Disini negeri kami
Tempat padi terhampar
Samuderanya kaya raya
Negeri kami subur Tuhan
-Di negeri permai ini
Berjuta rakyat bersimbah luka
Anak kurus tak sekolah
Pemuda desa tak kerja
-Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darang juang kami
Untuk membebaskan rakyat
-Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darang juang kami
Padamu kami berjanji
Padamu kami mengabdi

BURUH TANI

-Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Gegap gempita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia
-Hari-hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa orba
-Marilah kawan mari kita kabarkan
Ditangan kita tergenggam arah bangsa
Marilah sahabat mari kita nyanyikan
Sebuah lagu tentang pembebasan
-Dibawah kuasa Tirani
Kususuri garis jalan ini
Berjuta kali turun aksi
Bagiku satu langkah pasti

Referensi :

Karim, Abdul. 2012. *Reformulasi Aswaja Sebagai Manhajul-Fikr & Manhajul-Amal.* Tim Aswaja Center Pcnu Pati.

Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2007. *Manifesto Ideologi kiri: Melacak Akar Ideologi Dunia dan Epistemologi Perubah Sosial Revolusioner-Subversif.* Panduan Sekolah Ideologi 2.

______________ 2007. *Paradigma dan Sosiologi Perubahan Sosial.* Buku Panduan Sekolah Analisis Sosial.

______________ 2007. *Refleksi Paradigma Pendidikan Kritis; dari Tatanan Ekonomi Global Sampai Kapitalisasi Pendidikan.* Buku Panduan Pelatihan Pendidikan Kritis.

______________ 2008. *Paradigma PMII pada Era Transisi Globalisasi.* Yogyakarta.

______________ 2008. *Seri Ideologi Dunia.* Buku Panduan Sekolah Ideologi 1.

______________ 2009. *Hand-Out PKD;Sejarah Ideologi Dunia.* Yogyakarta.

______________ 2012. *Sejarah Teologi Islam & Akar Sejarah ASWAJA.* Cilacap. Cet. I.

______________ 2012. *Manifesto Wacana Kiri.* Yogyakarta. Eye On The Revolution + Revdem Cilacap. Cet. V.

Modul Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat Brawijaya Malang

Modul Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat Makhdum Ibrahim Tuban

Modul Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat Sunan Giri Bojonegoro

(MUJAHID BERKEADABAN)

SUMPAH MAHASISWA INDONESIA

Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah….
Bertanah Air Satu, Tanah Air Tanpa Penindasan.
Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah….
Berbangsa Satu, Bangsa yang Gandrung akan Keadilan.
Kami Mahasiswa Indonesia Bersumpah….
Berbahasa Satu, Bahasa Tanpa Kebohongan.

PMII hadir sebagai Cawah Candradimuka membentuk pola pikir kritis yang relevan dengan hukum keseimbangan zaman. Pembentuk Kader inti solutif dalam segala bidang. Dengan harapan terwujudnya kader Mujahid yang Berkeadaban, dan mampu menjawab problematika zaman dengan jalan yang diridloi Tuhan sesuai manhaj yang digunakan.
Berproseslah semampu kalian Sahabat! Loyalitas dan Komitmen mari kita jaga bersama-sama.
Salam Manis untuk Kader Idealis.
(PK. PMII Sunan Giri Bojonegoro)
Masa Gerak 2018-2019

29 Maret – 1 April 2019
Gedung MWC NU Cepu